



Keputusan Wali Kota
No. 000.7.2 / 273 / 2026

Lampiran IX

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027



DP3APPKB

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah daerah. Renja PD Tahun 2027 bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga disusun sebagai instrumen operasional tahunan untuk menjamin kesinambungan pembangunan di bidang pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian kependudukan dan keluarga berencana.

Penyusunan Renja PD Tahun 2027 didasarkan pada amanat regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, khususnya:

- a. Pasal 139 ayat (2): Rancangan akhir Renja PD disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.
- b. Pasal 141: Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja PD diselesaikan paling lambat 2 minggu setelah penyampaian rancangan akhir tersebut.
- c. Pasal 142 ayat (2): Penetapan Renja PD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Secara substansial, penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2026, serta Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor:000.7/112 tanggal 9 Februari 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027.

Nilai strategis dari Renja DP3APPKB Tahun 2027 ini adalah sebagai jembatan untuk menjawab dinamika isu-isu krusial di Kota Salatiga. Isu tersebut meliputi perlunya penguatan perencanaan responsif gender (PPRG), peningkatan capaian skor Kota Layak Anak (KLA) yang saat ini masih berada di kategori Nindya, optimalisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan *Total Fertility Rate* (TFR) , serta peningkatan kualitas keluarga melalui perluasan pemanfaatan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Melalui keterpaduan

perencanaan ini, diharapkan seluruh program dan kegiatan yang didanai melalui APBD dapat memberikan dampak nyata yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat Kota Salatiga.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang relevan, signifikan, dan melandasi penyusunan Rencana Kerja DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2027 disusun dengan kaidah produk hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah *jo.* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025–2029;
9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Salatiga;
10. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027;

11. Surat Edaran Wali Kota Salatiga Nomor 000.7/112 tanggal 9 Februari 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2027;
12. Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.7/2621 tanggal 9 Juli 2026 hal Penyusunan Renja PD 2027.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2027 adalah menyediakan dokumen perencanaan komprehensif yang memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan, target kinerja, dan kerangka pendanaan untuk tahun anggaran 2027.

Tujuan dari penyusunan Renja ini meliputi:

1. Menjadi pedoman operasional resmi bagi seluruh jajaran aparatur di lingkungan DP3APPKB Kota Salatiga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan sepanjang tahun 2027.
2. Menyelaraskan target program, kegiatan, dan subkegiatan tahunan dengan arah kebijakan tujuan strategis jangka menengah yang tertuang dalam Rensta PD Tahun 2025-2029 dan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027.
3. Menjamin terciptanya keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dana transfer pusat (seperti DAK) dalam intervensi pelayanan publik yang responsif gender dan ramah anak.
4. Menyediakan indikator tolok ukur yang jelas sebagai dasar pelaksanaan pemantauan, pengendalian, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja instansi secara berkala.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja (Renja) DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2027 secara ringkas diuraikan ke dalam sistematika bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan gambaran umum penyusunan Renja yang memuat latar belakang, dasar hukum yang digunakan, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menyajikan gambaran capaian kinerja bidang urusan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) tahun

2025 (capaian tahun pertama Rensta 2025-2029), evaluasi SPM (bagi urusan terkait), analisis rumusan masalah dan isu strategis tahun 2027, telaah pokok-pokok pikiran DPRD, serta inovasi bidang urusan pelayanan yang dikembangkan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan perumusan tujuan dan sasaran Renja PD 2027 yang selaras dengan Rensta PD 2025-2029, hasil analisis target indikator berdasarkan evaluasi pencapaian tahun-tahun sebelumnya, serta arah kebijakan operasional yang diselaraskan dengan kebijakan nasional dan daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan rincian program, kegiatan, dan subkegiatan tahun 2027 yang disusun secara sistematis berdasarkan RPJMD dan Rensta, dilengkapi rencana pendanaan indikatif baik untuk program reguler maupun program prioritas khusus (seperti pencapaian SPM, Program Strategis Nasional/ProSN, intervensi stunting, dan direktif pemerintah).

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target indikator kinerja secara kuantitatif yang mencakup target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah untuk tahun 2027.

BAB VI PENUTUP

Berisi kesimpulan akhir pelaksanaan rencana, catatan penting komitmen, serta harapan pemangku kepentingan terhadap efektivitas pencapaian Renja PD Tahun 2027.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DP3APPKB dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025

1. Gambaran Umum Hasil Pelaksanaan Renja DP3APPKB Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Tahun 2026

Evaluasi pelaksanaan Renja DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2025 dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran dalam Renstra DP3APPKB Tahun 2025–2029. Evaluasi ini juga dimaksudkan sebagai dasar perbaikan perencanaan pada Tahun 2027 agar lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dan isu strategis pembangunan daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DP3APPKB Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum kinerja program dan kegiatan berada pada kategori baik hingga sangat baik, ditandai dengan tingginya tingkat realisasi indikator output dan outcome pada sebagian besar program prioritas urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk-KB).

Mayoritas program, antara lain Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), serta Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) telah mencapai bahkan melampaui target kinerja tahunan. Hal ini menunjukkan konsistensi implementasi kebijakan daerah dalam mendukung target RPJMD/RPD dan Renstra DP3APPKB.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator kinerja strategis dan kegiatan tertentu yang belum memenuhi target, khususnya pada indikator yang bersifat outcome makro dan dipengaruhi faktor eksternal lintas sektor, seperti:

- Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) yang belum mencapai target Renstra,
- Angka kelahiran remaja (ASFR 15–19 tahun),

- Cakupan perkawinan usia di bawah 21 tahun, serta
- Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak, yang masih fluktuatif akibat keterbatasan jangkauan intervensi dan dinamika sosial di tingkat masyarakat.

2. Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target

Beberapa program/kegiatan yang realisasinya belum memenuhi target kinerja antara lain:

- Kegiatan terkait penyediaan dan pemutakhiran data gender dan anak, yang belum optimal akibat keterbatasan integrasi data lintas perangkat daerah dan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi tematik.
- Indikator outcome pengendalian perkawinan usia anak dan remaja, yang capaian tahunannya masih dipengaruhi kuat oleh faktor sosial-budaya, ekonomi keluarga, serta belum meratanya implementasi Pendidikan Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi Remaja di seluruh satuan pendidikan.

Kondisi ini berimplikasi pada perlunya penguatan pendekatan kolaboratif lintas sektor, khususnya dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kesehatan, dan urusan sosial, serta optimalisasi peran kecamatan dan desa/kelurahan.

3. Program/Kegiatan yang Memenuhi Target

Sebagian besar kegiatan administratif penunjang urusan pemerintahan daerah, serta kegiatan teknis layanan PPPA dan KB, telah memenuhi target kinerja, antara lain:

- Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan PUG dan PPRG;
- Layanan pengaduan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pelaksanaan KIE Bangga Kencana;
- Pelayanan KB dan peningkatan kesertaan MKJP;
- Pembinaan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA).

Keberhasilan ini didukung oleh konsistensi perencanaan, dukungan anggaran APBD, serta sinergi pelaksanaan dengan mitra lintas sektor dan pemangku kepentingan di tingkat daerah.

4. Program/Kegiatan yang Melebihi Target

Terdapat sejumlah kegiatan yang capaian kinerjanya melebihi target Renja, terutama pada indikator output seperti jumlah peserta kegiatan, jumlah dokumen perencanaan, laporan koordinasi, serta cakupan layanan KB dan pembinaan kelompok kegiatan. Capaian yang melampaui target ini mencerminkan:

- Tingginya antusiasme masyarakat dan mitra kerja;
- Optimalisasi peran PLKB/PKB dan kader;
- Efektivitas pelaksanaan kegiatan berbasis wilayah (kampung KB, kelompok kegiatan, layanan terpadu).

Namun demikian, ke depan perlu dilakukan penyesuaian perumusan indikator agar lebih menekankan kualitas dampak (outcome) dibanding sekadar kuantitas output.

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja

Faktor pendukung capaian kinerja meliputi:

- Dukungan kebijakan daerah yang selaras dengan RPJMD/RPD;
- Alokasi anggaran APBD yang relatif memadai;
- Penguatan koordinasi lintas sektor;
- Ketersediaan SDM pelaksana dan jejaring mitra.

Adapun faktor penghambat meliputi:

- Masih terbatasnya integrasi dan pemanfaatan data sektoral (data gender, anak, dan keluarga);
- Dinamika sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi indikator outcome (perkawinan usia anak, ASFR);
- Keterbatasan jangkauan layanan di wilayah tertentu;
- Ketergantungan capaian indikator makro pada intervensi lintas perangkat daerah.

6. Implikasi terhadap Pencapaian Target Renstra PD

Hasil evaluasi Renja 2025 menunjukkan bahwa secara agregat, tren capaian kinerja DP3APPKB berada pada jalur yang searah dengan target Renstra PD. Mayoritas indikator output program telah tercapai, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap akumulasi capaian Renstra hingga tahun 2026.

Namun, apabila indikator-indikator outcome strategis (seperti MUKP, ASFR, perkawinan usia anak, dan partisipasi anak) tidak diperkuat intervensinya, maka terdapat risiko tidak optimalnya pencapaian target akhir Renstra, khususnya pada dimensi perubahan perilaku dan kualitas keluarga.

7. Perkiraan Capaian Tahun Berjalan (2026) Mengacu APBD 2026

Dengan telah disahkannya APBD Tahun 2026 pada saat penyusunan Renja PD, perkiraan capaian kinerja DP3APPKB Tahun 2026 diproyeksikan relatif stabil dan berpotensi meningkat pada indikator-indikator yang bersifat layanan langsung dan output kegiatan, seiring keberlanjutan program prioritas dan penguatan dukungan anggaran.

Program prioritas yang diproyeksikan memberi kontribusi signifikan terhadap capaian Renstra antara lain:

- Penguatan Kampung KB dan layanan Bangga Kencana;
- Pelembagaan PUG dan PPRG pada perangkat daerah;
- Penguatan sistem layanan perlindungan perempuan dan anak;
- Pendampingan keluarga berisiko stunting dan peningkatan ketahanan keluarga.

8. Kebijakan dan Tindakan Perencanaan-Penganggaran

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, kebijakan dan langkah perencanaan-penganggaran yang perlu ditempuh antara lain:

- a. Reorientasi indikator kinerja dari dominasi output menuju penguatan outcome dan dampak.
- b. Penguatan integrasi data gender, anak, dan keluarga melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.
- c. Fokus intervensi tematik pada isu strategis: perkawinan usia anak, kesehatan reproduksi remaja, penurunan ASFR, dan partisipasi anak.
- d. Penguatan kolaborasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, sosial, KUA, kecamatan/desa) untuk mendorong capaian indikator makro.
- e. Penajaman penganggaran APBD 2026 pada kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian target Renstra PD.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 %	85,44 %	89 %	89,32 %	100,36 %	90 %	264,76	300,86%
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100,00 %	10 dokumen	30	300,00%
2.08.01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan	10 laporan	10 laporan	100%	10 Laporan	30	300,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3	300,00%
2.08.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/Bulan	37 Orang/Bulan	35 bulan	33 bulan	94,29%	35 Orang/bulan	105	283,78%
2.08.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3	300,00%
2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3	300,00%
2.08.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3	300,00%
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			1 kegiatan	1 kegiatan	100%		1	
2.08.01.2.05.001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan			65 orang	65 orang	100%		65	

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
		Perundang-Undangan								
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3	300,00%
2.08.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	10 paket	10 paket	100%	1 Paket	31	155,00%
2.08.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	8 paket	8 paket	100%	1 Paket	19	190,00%
2.08.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	7 paket	7 paket	100%	1 Paket	18	180,00%
2.08.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Paket	3	300,00%
2.08.01.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	14	116,67%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.08.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	36	300,00%
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	43 Unit	43 Unit	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	1 Kegiatan	46	106,98%
2.08.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	43 Unit	15 unit	15 unit	100%		58	134,88%
2.08.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	57 unit	57 unit	100%	5 Unit	63	6300,00%
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3	300,00%
2.08.01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	14	116,67%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.08.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	25	2500,00 %
2.08.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 Laporan	36	300,00%
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3	300,00%
2.08.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 Unit	35 Unit	42 unit	42 unit	100%	42 unit	119	340,00%
2.08.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	6 unit	6 unit	100%	6 unit	17	340,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.08.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	29 unit	29 unit	100%	32 unit	111	222,00%
2.08.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	7	700,00%
2.08.01.2.09.011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	17 unit	17 unit	100%	47 unit	74	740,00%
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300	300,00%
		Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif	24 %	8 %	8 %	8 %	100%	24 %	40	166,67%
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,7 %	9,24 %	3,8 %	6 %	157,89 %	3,9 %	19,14	517,30%
		Persentase PUG aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %		200	200,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3	300,00%
2.08.02.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3	300,00%
2.08.02.2.01.004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	31 Perangkat Daerah	31 Perangkat Daerah					31	100,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)						4 Kecamatan		
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan Organisasi Perempuan, Pendidikan & Pelatihan Keterampilan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	300,00%
2.08.02.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	70 Orang	70 Orang	70 orang	70 orang	100%		140	200,00%
2.08.02.2.03.007	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan						2 Lembaga		

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300	300,00%
		Rasio Kekerasan terhadap perempuan	14,13 %	44,1 %	14,13 %	6,31 %	44,66%		50,41	356,76%
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Kontribusi & Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Perempuan	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	13,12 %	37,12	309,33%
2.08.03.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		2	200,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.08.03.2.01.006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota						1 Lembaga		
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Perempuan	15 Orang	15 Orang	15 orang	15 orang	100%		30	200,00%
2.08.03.2.02.001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15 Orang	15 Orang	15 orang	15 orang	100%		30	200,00%
2.08.03.2.02.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	10 Layanan	10 Layanan	15 layanan	15 layanan	100%		25	250,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
		Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan pelaporan kasus kekerasan	1 Tahun	1 Tahun	2 tahun	2 tahun	100%	1 Tahun	4	400,00%
2.08.03.2.03.002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang	10 orang	10 orang	100%		20	200,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.08.03.2.03.006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan provinsi						1 Laporan		
2.08.03.2.03.008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek						100 org		
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	50 %	25 %	25 %	25 %	100%		125	250,00%
		Persentase PKK aktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	225	225,00%
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan & Peningkatan Kapasitas Kader PKK	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%		24	200,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.08.04.2.01.003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		13	108,33%
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan & Peningkatan Kapasitas Kader PKK						1 Tahun		
2.08.04.2.02.007	Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas						1 Lembaga		
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300	300,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Data e Kekerasan & Penyusunan Data SIGA	2 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%	1 Dokumen	2	100,00%
2.08.05.2.01.001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0,00%		1	100,00%
2.08.05.2.01.003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia						1 Dokumen		
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak	61,7 %	6,79 %	64,0 %	4,5 %	7,02%	66,3 %	77,64	125,69%
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Kelurahan & Kecamatan menuju Layak Anak	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3	300,00%
2.08.06.2.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		2	200,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
	Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.06.2.01.003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						1 Lembaga		
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3	300,00%
2.08.06.2.02.001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	110 Orang	110 Orang	110 orang	110 orang	100%		220	200,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
		Kewenangan Kabupaten/Kota								
2.08.06.2.02.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%		2	200,00%
2.08.06.2.02.007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)						1 Lembaga		
2.08.06.2.02.009	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan						1 Lembaga		

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan	0,02 %	0,06 %	0,02 %	0,11 %	18,18%	0,02 %	0,19	950,00%
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelembagaan penanganan kasus kekerasan berbasis masyarakat	1 Tahun	1 Tahun	12 bulan	12 bulan	100%		13	1300,00 %
2.08.07.2.01.004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	10 Orang	10 Orang	10 orang	10 orang	100%		20	200,00%
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan terhadap anak	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%		2	200,00%
2.08.07.2.02.005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	10 Orang	10 Orang	10 orang	10 orang	100%		20	200,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.08.07.2.02.006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Orang	10 Orang	15 layanan	15 layanan	100%		25	250,00%
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan penanganan kasus kekerasan	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3	300,00%
2.08.07.2.03.006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	10 Orang	10 Orang	10 orang	10 orang	100%		20	200,00%
2.08.07.2.03.007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3	300,00%
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	300	300,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-49 thn (ASFR)	1,8 %	0,63 %	1,75 %	0,63 %	36,00%	1,74 %	3	166,67%
		Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	2,1 %	0,07 %	2 %	2,94 %	147%	1,8 %	4,81	229,05%
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22 tahun	23 tahun	22,1 tahun	21 tahun	95,02%	22,1 Tahun	66,1	300,45%
		Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	79 %	100 %	90 %	100 %	111,11 %	99 %	299	378,48%
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tercapainya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%		2	200,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026		
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100	
		kuantitas penduduk									
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tercapainya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk			1	dokumen	1 dokumen	100%	1 Tahun	2	#DIV/0!
2.14.02.2.01.002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			1			0,00%		0	

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.14.02.2.01.009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	100 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 satuan pendidikan	2 satuan pendidikan	200%		3	3,00%
2.14.02.2.01.012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	31 Organisasi	31 Organisasi	2 organisasi	2 organisasi	100%		33	106,45%
2.14.02.2.01.016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 Kegiatan	3	300,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota						1 dokumen		
2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal						3 Satuan Pendidikan		
2.14.02.2.01.0028	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						1 Laporan		

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3	300,00%
2.14.02.2.02.009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%		2	200,00%
2.14.02.2.02.012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	3	300,00%
2.14.02.2.02.013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3	300,00%
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)	1:2 rasio	1:2, rasio 3	1:2 rasio	1:2, rasio 5	1,68%	1:2 Rasio	0,0445	103,35%
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	13 %	8,51 %	12 %	3,65 %	30,42%	11 %	23,16	178,15%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,7 % 5	26,6 % 5	27,5 % 7	41,1 % 9	149,40 %	28,3 % 9	96,23	359,74%
		Rasio akseptor KB baru	72 %	14,3 % 1	73 %	24,5 %	33,56%	75 %	113,81	158,07%
		Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	78,2 %	67,7 %	67,7 %	65,4 % 4	96,66%	78,4 %	211,54	270,51%
		Cakupan peserta KB aktif	83 %	67,7 %	67,7 %	65,4 % 4	96,66%	85 %	218,14	262,82%
		Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP	87 %	100 %	100 %	100 %	100%	90 %	290	333,33%
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3	300,00%
2.14.03.2.01.008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	1 Laporan					1	100,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	3	300,00%
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	3	300,00%
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	3	300,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
		Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang								
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Organisasi	2 Organisasi	2 organisasi	2 organisasi	100%		4	200,00%
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3	300,00%
2.14.03.2.02.004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	45 Orang	45 Orang	256 orang	256 orang	100%	255 Org	556	1235,56 %

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3	300,00%
2.14.03.2.03.001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%		2	200,00%
2.14.03.2.03.003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	995 Orang	600 Orang	600 orang	600 orang	100%	600 Org	1800	180,90%
2.14.03.2.03.004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan	8 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	8 Laporan	17	1700,00 %

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.14.03.2.03.008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%		2	200,00%
2.14.03.2.03.010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30 Orang	38 Orang				40 Org	78	260,00%
2.14.03.2.03.013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	18 Orang	22 Orang	22 orang	22 orang	100%	22 Org	66	366,67%
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan)	5 Poktan	5 Poktan	1 tahun	1 tahun	100%	5 Poktan	11	220,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.14.03.2.04.002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen					1	100,00%
2.14.03.2.04.006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	10 Kampung	10 Kampung	23 kampung	23 kampung	100%	23 Kampung	56	560,00%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	1:2 rasio	1:1,9 rasio	1:2 rasio	1:1,9 rasio	1,66%	1:2 rasio	0,04449	103,33%
		Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun	1,8 %	0,39 %	1,7 %	4,12 %	41,26%	1,6 %	6,11	339,44%
		Persentase Baduta Stunting	24 %	5,75 %	22 %	5,75 %	382,61 %	19 %	30,5	127,08%
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	80 %	95,3 %	82 %	97,4 %	118,87 %	83 %	275,77	344,71%
		Cakupan Kader BKB yang Terlatih	85 %	74,7 %	87 %	53,6 %	61,71%	87 %	215,43	253,45%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
		Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	90 %	100 %	90 %	99,66 %	110,73 %	90 %	289,66	321,84%
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3	300,00%
2.14.04.2.01.008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%		2	200,00%
2.14.04.2.01.017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	3	300,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	2 Unit	28 Unit	10 unit	10 unit	100%		38	1900,00 %
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	60 Orang	60 Orang	60 orang	60 orang	100%		120	200,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)						1 Laporan		
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapainya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1 Tahun	1 Tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 Tahun	3	300,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.14.04.2.02.003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	139 Organisasi	2 Organisasi	162 organisasi	162 organisasi	100%		164	117,99%
2.14.04.2.02.004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	1 Laporan					1	100,00%
2.14.04.2.02.005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	3	300,00%

Kode	Urusan/Urusan Bidang/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (akhir periode RENSTRA PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA s/d Tahun 2026	
					Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Renja PD Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)*100	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)*100
2.14.04.2.02.006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	3	300,00%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DP3APPKB

Analisis kinerja pelayanan DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2025 dilakukan berdasarkan indikator kinerja pelayanan yang telah ditetapkan, baik yang bersumber dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), maupun indikator pelayanan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang relevan dengan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan/Outcome (IKK), dan indikator kinerja program pada periode 2025–2026 serta proyeksi hingga 2028, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja DP3APPKB menunjukkan tren positif dan relatif konsisten dengan target Renstra OPD. Mayoritas indikator output dan sebagian indikator outcome telah mencapai atau mendekati target tahunan, khususnya pada indikator layanan, kelembagaan, serta fasilitasi program Bangga Kencana, PUG, PPRG, dan perlindungan perempuan dan anak.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator outcome strategis yang belum sepenuhnya mencapai target dan menunjukkan fluktuasi capaian, terutama indikator yang dipengaruhi kuat oleh faktor sosial, budaya, serta intervensi lintas sektor, seperti indikator pengendalian perkawinan usia anak, ASFR remaja, MUKP, rasio kekerasan terhadap perempuan, serta indikator kependudukan makro.

1. Kajian Capaian IKU (Outcome Strategis OPD)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Target capaian iBangga tahun 2026 sebesar 69,4 dan proyeksi 2027 sebesar 70 menunjukkan tren peningkatan dan bergerak menuju target Renstra 71,4 pada 2028. Hal ini mengindikasikan perbaikan kualitas keluarga melalui intervensi Bangga Kencana, namun masih diperlukan penguatan pendampingan keluarga berisiko dan integrasi program lintas sektor untuk mempercepat pencapaian target akhir Renstra. Tantangan utama terdapat pada dimensi kemandirian ekonomi keluarga dan pola pengasuhan. Diperlukan penguatan integrasi program Kampung Keluarga Berkualitas, BKB, BKR, BKL, serta sinergi lintas OPD dalam intervensi keluarga rentan.

Rasio Kekerasan terhadap Perempuan

Rasio kekerasan terhadap perempuan menunjukkan tren penurunan sesuai target Renstra (dari 40,1 menjadi 39 dan diproyeksikan turun ke 35,1). Penurunan ini mencerminkan efektivitas layanan penanganan korban dan upaya pencegahan. Meski demikian, angka kekerasan masih relatif tinggi sehingga penguatan upaya preventif berbasis komunitas dan edukasi sosial perlu terus ditingkatkan. Peningkatan pelaporan mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat, namun juga menunjukkan masih tingginya prevalensi kasus. Penguatan pencegahan berbasis komunitas, optimalisasi UPTD PPA, serta penguatan jejaring layanan lintas sektor perlu ditingkatkan.

Indeks Perlindungan Anak (IPA), IPHA, dan IPKA

Ketiga indikator perlindungan anak relatif stabil dan mendekati target Renstra, dengan capaian IPA sekitar 72–73, IPHA sekitar 71, dan IPKA sekitar 80. Capaian ini menunjukkan keberlanjutan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak, namun peningkatan kualitas layanan perlindungan khusus anak masih diperlukan untuk mendorong kenaikan indeks secara lebih signifikan.

ASFR Remaja (15–19 Tahun)

Angka kelahiran remaja masih berfluktuasi dan pada 2026 tercatat lebih tinggi dari target (proyeksi realisasi 1 dibanding target 0,55), yang mengindikasikan bahwa upaya pencegahan kehamilan remaja belum optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan intervensi Kesehatan Reproduksi Remaja, PIK-R, edukasi di satuan pendidikan, serta kolaborasi dengan sektor kesehatan dan pendidikan.

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

IPBK menunjukkan tren meningkat menuju target Renstra, sementara LPP relatif stabil di kisaran target 1,3. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian penduduk mulai berdampak, meskipun tantangan kependudukan masih memerlukan penguatan kebijakan berbasis data dan proyeksi kependudukan yang lebih presisi.

Score KLA, IDG, dan IPG

Score KLA mengalami peningkatan signifikan pada 2025, melampaui target Renstra tahunan, yang mencerminkan penguatan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Namun, indikator IDG dan IPG masih menunjukkan fluktuasi, mengindikasikan bahwa kesenjangan gender dalam akses dan peran pembangunan masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih sistematis melalui PUG dan ARG. Tahun 2027 indikator ini tidak lagi digunakan sebagai indikator kinerja utama.

2. Kajian Capaian IKK (Outcome Program)

Indikator IKK seperti TFR, mCPR, unmet need, CPR, serta penanganan korban kekerasan secara umum menunjukkan capaian yang mendekati atau sesuai target Renstra. Peningkatan pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) dan penurunan unmet need mencerminkan membaiknya akses layanan KB.

Namun, TFR dan ASFR remaja masih menjadi tantangan utama karena sangat dipengaruhi oleh perilaku reproduksi dan norma sosial. Oleh karena itu, keberhasilan indikator ini sangat bergantung pada konsistensi layanan KB, edukasi pranikah, pendewasaan usia perkawinan (PUP), serta sinergi dengan sektor kesehatan dan pendidikan.

3. Kajian Capaian Indikator Program (Output dan Kelembagaan)

Sebagian besar indikator program menunjukkan capaian 100% atau mendekati 100%, antara lain:

- Kelembagaan PUG aktif,
- Perangkat daerah yang melaksanakan PPRG,
- UPTD PPA sesuai standar,
- Penanganan korban kekerasan sesuai standar,
- Integrasi GDPK 5 pilar dalam dokumen perencanaan,
- Ketersediaan data mikro keluarga di desa/kelurahan.

Capaian tinggi pada indikator output ini menunjukkan bahwa aspek tata kelola, kelembagaan, dan layanan telah berjalan baik. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara tingginya capaian output dengan capaian outcome strategis, yang mengindikasikan perlunya penajaman

kualitas intervensi agar lebih berdampak pada perubahan perilaku dan kondisi sosial di masyarakat.

4. Isu Strategis dan Permasalahan Kinerja

Beberapa isu strategis yang mempengaruhi capaian kinerja antara lain:

- Perkawinan usia anak dan MUKP yang belum sepenuhnya sesuai target Renstra,
- ASFR remaja yang masih fluktuatif dan cenderung belum terkendali,
- Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang meskipun menunjukkan tren penurunan, namun masih membutuhkan upaya pencegahan yang lebih masif,
- Kualitas integrasi data gender, anak, dan keluarga yang belum sepenuhnya optimal untuk mendukung perencanaan berbasis bukti.

5. Implikasi terhadap Pencapaian Renstra dan Arah Kebijakan

Secara agregat, capaian kinerja DP3APPKB berada pada jalur pencapaian target Renstra OPD, khususnya pada indikator output dan kelembagaan. Namun, untuk memastikan ketercapaian target akhir Renstra pada indikator outcome strategis, diperlukan:

- Penguatan intervensi perubahan perilaku (PUP, KRR, PIK-R, edukasi pranikah);
- Integrasi lintas sektor (pendidikan, kesehatan, KUA, kecamatan/desa);
- Penguatan pemanfaatan data mikro keluarga sebagai dasar targeting program;
- Penajaman kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak berbasis wilayah;
- Reorientasi penganggaran pada kegiatan dengan daya ungkit tinggi terhadap indikator outcome (ASFR, MUKP, TFR,).

Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja DP3APPKB secara umum cukup efektif dalam mencapai target output dan kelembagaan, namun masih menghadapi tantangan pada pencapaian indikator outcome strategis yang memerlukan perubahan perilaku dan intervensi lintas sektor. Dengan penguatan kebijakan, kolaborasi, dan penajaman program pada tahun 2026–2028, target akhir Renstra OPD dinilai masih realistis untuk dicapai, khususnya apabila fokus diarahkan pada isu strategis pengendalian

perkawinan usia anak, kesehatan reproduksi remaja, dan peningkatan kualitas keluarga. Pencapaian kinerja pelayanan DP3APPKB disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Salatiga**

NO	INDIKATOR	SPM	IKU/ IKK/ Program		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
IKU													
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		70,4	Angka		69,4	70,40	71,4		69,4	70	71,4	Tantangan utama terdapat pada dimensi kemandirian ekonomi keluarga dan pola pengasuhan. Diperlukan penguatan integrasi program Kampung Keluarga Berkualitas, BKB, BKR, BKL, serta sinergi lintas OPD dalam intervensi keluarga rentan.
2.	Rasio Kekerasan terhadap perempuan		39,1	%		40,1	39,10	35,1		40,1	39	35,1	Peningkatan pelaporan mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat, namun juga menunjukkan masih tingginya prevalensi kasus. Penguatan pencegahan berbasis komunitas, optimalisasi UPTD PPA, serta penguatan jejaring layanan lintas sektor perlu ditingkatkan.
3.	Indeks Perlindungan Anak (IPA)		72,6	Angka		72,59	72,60	72,62		72,59	73	72,62	Perlu mengoptimalkan koordinasi lintas sektor. Penguatan UPTD PPA dan

NO	INDIKATOR	SPM	IKU/ IKK/ Program		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
													jejaring layanan perlu terus ditingkatkan.
4.	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		71,12	Angka		71,1	71,12	71,13		71,1	71	71,13	Tantangan utama terdapat pada pemenuhan hak anak di bidang partisipasi, perlindungan, dan lingkungan ramah anak. Integrasi kebijakan KLA ke dalam perencanaan OPD perlu diperkuat.
5.	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		80,37	Angka		80,35	80,37	80,39		80,35	80	80,39	Perlu penguatan SDM pendamping
6.	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)		0,55	per 100.000 kelahiran hidup		0,6	0,55	0,5		0,6	1	0,5	Dipengaruhi oleh tingginya perkawinan usia anak serta keterbatasan akses edukasi kesehatan reproduksi remaja. Program edukasi remaja, dan sinergi dengan sektor pendidikan perlu diperkuat.
7.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)		84,5	Angka		81,5	84,5	86,5		81,5	84,5	86,5	integrasi isu kependudukan dalam dokumen perencanaan OPD belum merata. Diperlukan penguatan mainstreaming wawasan kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah

NO	INDIKATOR	SPM	IKU/ IKK/ Program		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.	Laju Pertumbuhan Penduduk			%	1,3	1,3			1,2	1,3			Konsistensi layanan KB, terutama metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), menjadi faktor kunci pengendalian pertumbuhan penduduk.
9.	Score Capaian KLA			Nilai	625	630			682,21	630			Peningkatan skor KLA menunjukkan komitmen daerah terhadap pemenuhan hak anak, namun masih terdapat gap pada pemenuhan indikator kelembagaan dan partisipasi anak. Perlu penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA dan keterlibatan OPD teknis.
10.	IDG			Nilai	81	81,5			65,05	81,5			Diperlukan kebijakan afirmatif untuk peningkatan kepemimpinan dan partisipasi ekonomi perempuan
11.	IPG			Nilai	96	96,5			95,59	96,5			Kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan masih menjadi tantangan. Penguatan PUG dalam perencanaan dan penganggaran perlu terus dilakukan.

NO	INDIKATOR	SPM	IKU/ IKK/ Program		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
IKK													
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		9,31	%	3,8	9,29	9,31	9,33	6	9,29	9,31	9,33	Capaian ARG menunjukkan tren peningkatan, namun kualitas penganggaran responsif gender belum merata di seluruh OPD. Diperlukan peningkatan kapasitas perencana OPD dalam penyusunan GAP dan GBS
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota		100	%		100	100	100	100	100	100	100	Capaian relatif baik, namun masih terdapat potensi under-reporting. Penguatan mekanisme pelaporan dan layanan rujukan perlu diperluas hingga tingkat komunitas.
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		68,59	%		68,94	68,59	68,25		68,94	68,59	68,25	Angka rasio masih relatif tinggi, menunjukkan perlunya penguatan upaya pencegahan, deteksi dini, dan penegakan hukum yang lebih tegas, serta penguatan layanan pemulihan korban.
4.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun		1,74	Rata-rata anak per wanita	2,2	1,72	1,74	1,77	2,02	1,72	1,74	1,77	TFR cenderung mendekati target, namun dipengaruhi oleh disparitas wilayah dan akses layanan KB. Penguatan MKJP dan peningkatan

NO	INDIKATOR	SPM	IKU/ IKK/ Program		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
													kualitas KIE KB menjadi kunci pencapaian target
5.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		68,36	%		67,02	68,36	69,05		67,02	68,36	69,05	mCPR meningkat namun belum optimal. Tantangan utama meliputi preferensi metode jangka pendek, keterbatasan akses MKJP, dan persepsi efek samping. Diperlukan penguatan layanan MKJP dan edukasi pasangan usia subur.
6.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		6,89	%	12	7,66	6,89	6,2	3,65	7,66	6,89	6,2	Unmet need masih menjadi isu krusial akibat keterbatasan akses layanan, hambatan sosial budaya, dan persepsi negatif terhadap kontrasepsi. Perlu pendekatan berbasis komunitas dan peningkatan kualitas layanan KB.
7.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota			%	100	100				100			-

NO	INDIKATOR	SPM	IKU/ IKK/ Program		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
8.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif			%	100	100				100			-
9.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49			%	67,7	78,4			65,44	78,4			CPR menunjukkan tren meningkat namun masih fluktuatif. Konsistensi pelayanan KB di fasilitas kesehatan dan peran PLKB menjadi faktor penentu keberlanjutan capaian
PROGRAM													
1.	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan		100	%		100	100	100		100	100	100	Capaian relatif baik, namun kualitas output kegiatan perlu ditingkatkan agar berdampak langsung pada peningkatan kinerja layanan publik.
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		85,85	Nilai	89	85,5	89	89,3	89,32	85,5	90	90,5	IKM menunjukkan perbaikan, namun masih dipengaruhi oleh kualitas layanan, sarana prasarana, dan kecepatan respon pengaduan. Digitalisasi layanan dan peningkatan kompetensi petugas layanan perlu diperkuat.

NO	INDIKATOR	SPM	IKU/ IKK/ Program		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		77,1	Nilai	77,4	77,4	77,1	77,2	77,4	77,4	77,5	77,6	Nilai SAKIP relatif stabil, namun penguatan keterkaitan perencanaan, penganggaran, dan kinerja masih perlu ditingkatkan. Penguatan monev internal dan kualitas indikator kinerja menjadi fokus perbaikan
4.	Persentase Kelembagaan PUG aktif		100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Kelembagaan PUG telah terbentuk, namun kualitas peran dan fungsi belum optimal. Diperlukan penguatan peran focal point gender di OPD
5.	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG		100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Capaian kuantitatif baik, namun kualitas implementasi PPRG bervariasi. Pendampingan teknis dan supervisi berkala diperlukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan responsif gender.
6.	Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif			%	8	24			8	24			Capaian masih dipengaruhi dinamika politik elektoral. Upaya peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan dan advokasi kebijakan

NO	INDIKATOR	SPM	IKU/ IKK/ Program		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
													afirmatif perlu terus dilakukan.
7.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			%	3,8	3,9			6	3,9			-
8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu			%	100	100			100	100			-
9.	Rasio Kekerasan terhadap perempuan			%	14,13				6,31				-
10.	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart		100	%		100	100	100		100	100	100	-
11.	Persentase UPTD PPA sesuai standart layanan		100	%		100	100	100		100	100	100	keterbatasan SDM, sarana, dan jejaring rujukan masih menjadi tantangan. Perlu penguatan kapasitas layanan berbasis standar.

NO	INDIKATOR	SPM	IKU/ IKK/ Program		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan			%	25	100			25	100			Cakupan PPKS belum merata di seluruh kecamatan. Keterbatasan anggaran dan SDM menjadi kendala utama. Diperlukan strategi bertahap pemenuhan layanan PPKS.
13.	Persentase PKK aktif		100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-
14.	Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak		100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-
15.	Persentase kelembagaan forum anak yang aktif		100	%		100	100	100		100	100	100	Diperlukan penguatan ruang partisipasi anak yang bermakna dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
16.	Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak			%	64,06	66,35			4,5	66,35			-
17.	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif		100	%		100	100	100		100	100	100	-
18.	Persentase OPD yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen Perencanaan daerah		100	%		100	100	100		100	100	100	-

NO	INDIKATOR	SPM	IKU/ IKK/ Program		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
19.	Persentase anak korban kekerasan			%	0,02	0,02			0,11	0,02			-
20.	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan		100	%	100	100	100	100	100	100	100	100	-
21.	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun		0,07	%	2	1,8	0,07	0,06	1,8	1,8	0,07	0,06	-
22.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)		23	Tahun	22,1	22,1	23	23	21	22,1	23	23	Realisasi MUKP belum mencapai target Renstra akibat masih tingginya praktik perkawinan usia muda yang dipengaruhi faktor sosial budaya, ekonomi keluarga, serta rendahnya partisipasi pendidikan lanjutan. Diperlukan penguatan program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), edukasi remaja, serta kolaborasi dengan sektor pendidikan dan KUA.
23.	Rasio akseptor KB baru		14,5	%		14,4	14,5	14,55		14,4	14,5	14,55	
24.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per			%	1,75	1,74			0,63	1,74			

NO	INDIKATOR	SPM	IKU/ IKK/ Program		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	1000 perempuan usia 15-49 thn (ASFR)												
25.	Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)			%	90	99			100	99			
26.	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)			%	12	11			3,65	11			Persentase unmet need masih relatif tinggi dibanding target Renstra, menunjukkan masih terdapat kesenjangan akses dan pemanfaatan layanan KB. Kendala utama meliputi keterbatasan akses layanan MKJP, faktor persepsi masyarakat terhadap efek samping kontrasepsi, serta keterbatasan SDM dan sarana pelayanan di wilayah tertentu.
27.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49		68,77	%	67,7	67,75	68,77	70,14	65,44	67,75	68,77	70,14	

NO	INDIKATOR	SPM	IKU/ IKK/ Program		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
28.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		27,05	%	27,57	28,39	27,05	27,59	41,19	28,39	27,05	27,59	
29.	Rasio akseptor KB baru				73	75			24,5	75			
30.	Cakupan peserta KB aktif				67,7	85			65,44	85			
31.	Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP				100	90			100	90			
32.	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)		11,2	%		11,7	11,2	10,8		11,7	11,2	10,8	KTD masih terjadi akibat rendahnya literasi kesehatan reproduksi dan penggunaan kontrasepsi yang tidak konsisten. Diperlukan penguatan edukasi dan konseling KB.
33.	Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi)		83,5	%		82,7	83,5	84,3		82,7	83,5	84,3	
34.	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)		01:02	rasio	01:02	01:02,0	01:02	01:02	1;2,5	01:02,0	01:02	1;2,5	Distribusi PPKBD belum merata dan dipengaruhi keterbatasan kader aktif. Penguatan peran PPKBD dan dukungan operasional perlu ditingkatkan.

NO	INDIKATOR	SPM	IKU/ IKK/ Program		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
35.	Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun			%	1,7	1,6			4,12	1,6			Perkawinan usia muda masih terjadi akibat faktor sosial budaya dan ekonomi. Penguatan regulasi daerah, edukasi keluarga, dan peran tokoh masyarakat perlu dioptimalkan.
36.	Persentase Baduta Stunting				22	19			5,75	19			Angka stunting baduta dipengaruhi oleh pola asuh, gizi, dan sanitasi. Diperlukan sinergi lintas sektor dalam intervensi sensitif dan spesifik.
37.	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)		100	%		100	100	100		100	100	100	
38.	Cakupan Kader BKB yang Terlatih		75,97	%	87	74,85	75,97	77,49	53,69	74,85	75,97	77,49	
39.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB		96,93	%	82	95,50	96,93	98,87	97,47	95,50	96,93	98,87	Cakupan kader terlatih dan peserta BKB ber-KB belum merata akibat keterbatasan pelatihan dan keberlanjutan kader. Perlu strategi penguatan kapasitas kader secara berkelanjutan.

NO	INDIKATOR	SPM	IKU/ IKK/ Program		Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
40.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri		57,7	%		57,3	57,7	58,1		57,3	57,7	58,1	kualitas kemandirian masih bervariasi. Penguatan pendampingan lintas sektor diperlukan.
41.	Indeks Lansia Berdaya		57,1	Indeks		56,6	57,1	57,5		56,6	57,1	57,5	layanan ramah lansia masih terbatas. Diperlukan penguatan program pemberdayaan lansia berbasis komunitas.
42.	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja		93,6	Indeks		93,1	93,6	94		93,1	93,6	94	kualitas pengasuhan remaja masih dipengaruhi faktor literasi pengasuhan dan dinamika keluarga. Program BKR perlu diperkuat.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3APPKB

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3APPKB berada pada bidang layanan yang bersifat strategis dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup perempuan, anak, keluarga, serta pengendalian penduduk. Dinamika sosial, demografis, serta perkembangan kebijakan nasional mengharuskan DP3APPKB terus meningkatkan kapasitas, kualitas layanan, dan efektivitas program. Berikut uraian isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3APPKB.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Pelayanan

Secara umum, kinerja pelayanan DP3APPKB pada periode perencanaan menunjukkan capaian yang relatif stabil dan konsisten terhadap target Renstra, baik pada aspek pembangunan keluarga, perlindungan anak, pengendalian penduduk, maupun layanan pengarusutamaan gender. Berbagai indikator strategis menunjukkan tren mendekati atau setara dengan target tahunan, meskipun terdapat beberapa indikator yang mengindikasikan perlunya penguatan intervensi.

Pada aspek ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menunjukkan capaian 2025 sebesar 67,28, sedikit di bawah target 68,4. Namun proyeksi 2026–2028 menunjukkan kesesuaian penuh dengan target (69,4; 70,4; 71,4). Hal ini mencerminkan efektivitas konsolidasi kebijakan keluarga, meskipun masih diperlukan peningkatan pada dimensi partisipasi keluarga dan lingkungan yang mendukung.

Dalam aspek perlindungan dan pemenuhan hak anak, seluruh indeks IPA, IPHA, dan IPKA berada sangat dekat dengan target atau sesuai dengan target, menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak berjalan relatif efektif. Indeks IPA 2025 berada pada 72,57 (target 72,58), IPHA 71,09 (target 71,1), dan IPKA 80,34 (target 80,35). Konsistensi capaian sampai dengan 2028 mencerminkan bahwa kapasitas kelembagaan dan kolaborasi lintas perangkat daerah telah berfungsi baik.

Di sisi pengendalian fertilitas remaja, ASFR 15–19 masih berada pada angka 0,63 pada tahun 2025, sesuai target Renstra, tetapi tetap mengindikasikan adanya tantangan perilaku reproduksi remaja yang memerlukan intervensi edukasi lebih intensif. Sementara indikator pengendalian penduduk seperti TFR menunjukkan dinamika signifikan: realisasi 2025 adalah 1,71 (lebih rendah dari target 2,20), namun proyeksi

2027 menunjukkan kenaikan ke 1,96 sebelum kembali turun pada 2028. Hal ini menandakan bahwa perilaku fertilitas masyarakat bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi.

Pada aspek kekerasan terhadap perempuan dan anak, indikator rasio kekerasan relatif stabil dan sesuai target Renstra (44,1 → 35,1). Tingginya persentase penanganan kasus kekerasan (100%) menunjukkan respons layanan yang optimal, meskipun tingginya kasus menunjukkan perlunya penguatan pencegahan.

Pada bidang pelayanan KB, capaian mCPR (pemakaian kontrasepsi modern) berada sedikit di bawah target, namun tren peningkatan tetap terjaga yaitu 65,71 (2025) menuju 69,05 pada 2028. Sementara unmet need menunjukkan tren perbaikan dari 8,51 (2025) menuju 6,2 (2028).

Secara keseluruhan, pelayanan DP3APPKB menunjukkan kinerja yang baik dan konsisten. Namun terdapat beberapa hal kritis yang harus diperhatikan:

- a. Stabilitas fertilitas remaja dan dinamika TFR yang fluktuatif.
- b. Perlunya peningkatan kualitas intervensi pemenuhan hak anak meskipun indeks mendekati target.
- c. Tingginya kasus kekerasan yang masih terjadi meskipun layanan responsif sudah optimal.
- d. Pemanfaatan kontrasepsi modern yang masih sedikit di bawah target pada tahun awal perencanaan.

2. Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa permasalahan strategis masih menjadi hambatan dalam optimalisasi kinerja DP3APPKB, antara lain:

- a. Keterbatasan kualitas dan kapasitas kelembagaan layanan
Layanan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan jejaring rujukan. UPTD PPA yang belum terbentuk secara resmi, dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang belum terlaksana. Sistem pelaporan kekerasan belum sepenuhnya terintegrasi lintas sektor.

- b. Tantangan dalam perubahan perilaku masyarakat
ASFR 15–19 masih cenderung tinggi (0,63), mengindikasikan rendahnya literasi kesehatan reproduksi remaja dan masih kuatnya norma sosial yang mentoleransi perkawinan usia anak. Pemakaian kontrasepsi modern belum optimal dan unmet need masih signifikan (8,51% pada 2025). Perubahan perilaku keluarga terkait pola pengasuhan belum merata.
- c. Dinamika sosial-ekonomi
Fluktuasi TFR (1,71 pada 2025 naik menjadi 1,96 pada 2027) dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga dan perubahan nilai sosial.
- d. Kebutuhan layanan perlindungan anak yang terus meningkat
Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meskipun tingkat penanganan sudah 100%, menekan kapasitas layanan.
- e. Pendanaan yang terbatas untuk isu strategis
Anggaran Responsif Gender (ARG) yang hanya 9,23–9,33% dari belanja langsung APBD belum sepenuhnya mampu mendukung implementasi program besar seperti Kota Layak Anak (KLA), Pengarusutamaan Gender (PUG), dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
- f. Masih terdapat ketimpangan implementasi NSPK
Beberapa regulasi turunan nasional (NSPK KB, PPA, KLA, Kespro Remaja, dan Pembangunan Kependudukan) belum sepenuhnya terimplementasi secara konsisten di tingkat kelurahan dan kecamatan.

3. Dampak Terhadap Pencapaian Visi-Misi Kepala Daerah, SPM, NSPK, dan SDGs

- a. Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah
Kinerja DP3APPKB berkontribusi langsung pada misi daerah terkait Peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun demikian, indikator seperti ASFR, mCPR, dan TFR yang berfluktuasi dapat menghambat target pembangunan keluarga berkualitas yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia

b. Terhadap SPM

SPM layanan perlindungan anak mensyaratkan penanganan 100% kasus; capaian ini sudah terpenuhi, namun meningkatnya jumlah kasus dapat mengakibatkan beban kerja layanan yang semakin berat.

c. Terhadap NSPK

Implementasi NSPK masih belum sepenuhnya merata pada semua lini. Konsistensi pelatihan kader, penyediaan data mikro keluarga, dan pelaksanaan layanan rujukan masih perlu diperkuat.

d. Terhadap SDGs

Kinerja DP3APPKB berkaitan dengan beberapa tujuan SDGs:

- Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera): ASFR dan TFR memiliki korelasi langsung dengan target kesehatan ibu dan remaja.
- Tujuan 5 (Kesetaraan Gender): Kekerasan berbasis gender dan pemenuhan hak anak sangat menentukan capaian tujuan ini.
- Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Tangguh): Penanganan dan pencegahan kekerasan merupakan komponen inti.

Fluktuasi pada TFR dan tingginya ASFR dapat menghambat pencapaian SDGs 3 dan 5.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Tantangan:

- a. Meningkatnya tuntutan pelayanan perlindungan perempuan dan anak.
- b. Tingginya risiko kekerasan berbasis gender.
- c. Tantangan perubahan perilaku remaja terhadap kesehatan reproduksi.
- d. Keterbatasan anggaran berbasis ARG.
- e. Sistem data kependudukan dan keluarga yang belum sepenuhnya terintegrasi.
- f. Fluktuasi fertilitas masyarakat dan risiko kehamilan tidak direncanakan.

Peluang:

- a. Komitmen nasional melalui kebijakan tematik: KLA, PUG, PPRG, Stunting, TPPO.
- b. Integrasi layanan melalui UPTD PPA, PATBM, dan P2TP2A.

- c. Penguatan kolaborasi dengan sekolah, puskesmas, Polres, dan komunitas.
- d. Perkembangan teknologi informasi untuk pendataan keluarga (Super Apps)
- e. Momentum bonus demografi yang semakin dekat, mendorong orientasi kebijakan ke kualitas keluarga.

5. Formulasi Isu-Isu Penting untuk Perumusan Program Prioritas

Berdasarkan analisis kinerja, hambatan, dan peluang, isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan program tahun mendatang adalah:

Isu Penting 1: Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga

Gap pada iBangga dan dinamika TFR membutuhkan intervensi lintas sektor terkait pengasuhan, ekonomi keluarga, dan literasi gender. Perlu memperluas jangkauan konseling keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Isu Penting 2: Pencegahan Kekerasan dan Penguatan Layanan Perlindungan

Meskipun penanganan kasus 100%, jumlah kasus masih tinggi. Perlu penguatan pencegahan berbasis masyarakat dan teknologi pelaporan.

Isu Penting 3: Penguatan Layanan Kespro dan Pengendalian Fertilitas Remaja

ASFR dan unmet need masih memerlukan intensifikasi edukasi kespro remaja serta peningkatan akses KB ramah remaja.

Isu Penting 4: Optimalisasi Implementasi NSPK, SPM, dan Standar KLA

Diperlukan regulasi daerah, SOP, dan peningkatan kapasitas kader di tingkat kelurahan.

Isu Penting 5: Penguatan Pengarusutamaan Gender dan ARG

Peningkatan ARG dari 9,23% menuju standar ideal akan mempercepat capaian PUG dan KLA.

Isu Penting 6: Pembaruan Sistem Data dan Digitalisasi Pelayanan

Integrasi data keluarga, kependudukan, dan kasus kekerasan menjadi kebutuhan mendesak.

Isu Penting 7: Penguatan Kolaborasi Multipihak

Melibatkan lembaga pendidikan, dunia usaha, tokoh agama, dan komunitas untuk pencegahan kekerasan, peningkatan kualitas keluarga, dan edukasi remaja.

Isu Penting 8: Peningkatan Kualitas Keluarga

Peningkatan kualitas keluarga memerlukan pelibatan aktif Tim Penggerak PKK sebagai mitra strategis karena memiliki jejaring kader hingga tingkat kelurahan yang dekat dengan keluarga.

Isu-isu penting tersebut dirumuskan sebagai catatan strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas DP3APPKB Tahun 2027, agar intervensi yang dilakukan lebih fokus, terukur, dan berdampak nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Berikut tabel tentang review terhadap RKPD:

Tabel Tentang Review terhadap RKPD

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	6.715.418,405	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Salatiga	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	100	%	8.004.749,399	Terdapat penyesuaian pagu dan volume pada beberapa subkegiatan penunjang dibanding RKPD 2027, terutama pada belanja operasional, pemeliharaan sarpras, dan jasa penunjang, sebagai bentuk efisiensi anggaran ; Secara substansi program dan kegiatan tetap selaras dengan RKPD, namun terjadi perbedaan besaran kebutuhan dana karena penajaman target kinerja dan efisiensi
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	85,5				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	85,85	Nilai		
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,1	Nilai		
	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Salatiga	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Dokumen	10.500,00	
	2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	10 Laporan	5.000	2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	10	Laporan	3.500,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
			Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
	2.08.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		2.500	2.08.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	4.000,00	
	2.08.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	2.500	2.08.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Salatiga	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	3.000,00	
	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	5.741.882,179	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Salatiga	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Tahun	6.789.624,399	
	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	5.214.645,6	2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Salatiga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	Orang/Bulan	6.243.624,399	
	2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	527.236,579	2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	546.000,00	
	2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik		Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Tahun	60.000	2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik	Salatiga	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1	Tahun	60.000,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Daerah pada Perangkat Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Daerah pada Perangkat Daerah		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		60.000	2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	60.000,00	
	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	157.644,6	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Salatiga	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Tahun	208.000,00	
	2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.535	2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	Paket	11.000,00	
	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.669,6	2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Salatiga	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	Paket	48.000,00	
	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.170	2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Salatiga	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7	Paket	15.000,00	
						2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Salatiga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	4.000,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	6.270	2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Salatiga	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	5.000,00	
	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	103.000	2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Salatiga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	125.000,00	
	2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 unit	60.790	2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Salatiga	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2	Unit	190.625,00	
	2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	18.000	2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	50.000,00	
	2.08.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	42.790	2.08.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	140.625,00	
	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	240.869,226	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Tahun	361.000,00	
	2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	868	2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3.000,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	132.001,226	2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	250.000,00	
	2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	12 Laporan	108.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Salatiga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1	Laporan	108.000,00	
	2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	444.232,40	2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Salatiga	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Tahun	385.000,00	
	2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42 Unit	120.822,40	2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42	Unit	150.000,00	
	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	63.910	2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Salatiga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	85.000,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	46.000	2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29	Unit	35.000,00	
	2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	213.500	2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	80.000,00	
						2.08.01.2.09.0011 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Salatiga	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17	Unit	35.000,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Kelembagaan PUG aktif	100%	105.000	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Salatiga	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100	%	275.818,163	1. Terdapat penambahan subkegiatan pada hasil analisis kebutuhan (advokasi & sosialisasi PUG serta pendampingan lembaga penyedia layanan) yang belum seluruhnya tercantum
								Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	100	%		

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	1 Tahun	36.976	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	1	Tahun	92.000,00	eksplisit pada RKPD 2027; 2. Terjadi kenaikan kebutuhan dana dibanding pagu indikatif RKPD karena penguatan target implementasi PPRG lintas perangkat daerah serta perluasan cakupan pembinaan, advokasi, dan pendampingan kelembagaan
	2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraa n PUG	1 Laporan	5.000	2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraa n PUG	1	Laporan	5.000	
	2.08.02.2.01.0018 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraa n PUG kewenangan Kab/Kota	1 Laporan	31.976	2.08.02.2.01.0018 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota		Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraa n PUG kewenangan Kab/Kota	1	Laporan	31.976	
						2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Salatiga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaa n Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	25.024	
						2.08.02.2.01.0013 Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang	4	lembaga	30.000	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
								mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				
	2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Pembinaan Organisasi Perempuan, Pendidikan & Pelatihan Keterampilan	12 Bulan	68.024	2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	Pembinaan Organisasi Perempuan, Pendidikan & Pelatihan Keterampilan	12	Bulan	183.818,163	
	2.08.02.2.03.0013 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2 Lembaga	68.024	2.08.02.2.03.0013 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota		Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	2	lembaga	68.024	
						2.08.02.2.03.0007 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Salatiga	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	2	lembaga	115.794,170	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
						kewenangan Kabupaten/Kota						
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase UPTD PPA sesuai standart layanan	100%	70.000	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Salatiga	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart	100	%	360.875,28	Muncul subkegiatan layanan lanjutan (kesehatan non-BPJS, gelar kasus, pendampingan tenaga ahli, rumah perlindungan, medikolegal) serta peningkatan penguatan lembaga layanan yang belum seluruhnya tercantum rinci pada RKPD, sehingga kebutuhan anggaran meningkat signifikan.
			Persentase UPTD PPA sesuai standart layanan	100%				Persentase UPTD PPA sesuai standart layanan	100	%		
	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Advokasi, Kontribusi & Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Perempuan	1 Tahun	22.065,20	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Advokasi, Kontribusi & Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Perempuan	1	Tahun	30.000,00	
	2.08.03.2.01.0009 Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan		Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat	2 Kegiatan	2.065,20	2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	1	lembaga	30.000,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Kewenangan Kab/Kota		Kab/Kota, dan masyarakat									
	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Perempuan	25 Orang	28.485	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Perempuan	15	Orang	180.875,28	
						2.08.03.2.02.0003 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	15	orang	20.000,00	
						2.08.03.2.02.0004 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan	15	orang	40.875,28	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
								Tingkataten/Kota				
						2.08.03.2.02.0005 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	15	orang	25.000,00	
						2.08.03.2.02.0006 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	15	orang	20.000,00	
						2.08.03.2.02.0007 layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	15	orang	20.000,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	2.08.03.2.02.0014 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	25 Orang	28.485	2.08.03.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	15	orang	25.000,00	
						2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	15	orang	30.000,00	
	2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penanganan pelaporan kasus kekerasan	1 Tahun	19.449,80	2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Penanganan pelaporan kasus kekerasan	1	Tahun	150.000,00	
						2.08.03.2.03.0006 Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan	Salatiga	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan	1	Laporan	100.000,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
						Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota		Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi				
	2.08.03.2.03.0011 Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	50 Orang	19.449,80	2.08.03.2.03.0011 Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota		Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	50	Orang	30.550,20	
						2.08.03.2.03.0008 Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	100	Orang	50.000,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Persentase PKK aktif	100%	650.000	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Salatiga	Persentase PKK aktif	100	%	758.021,672	Terdapat kenaikan kebutuhan anggaran yang signifikan dibanding pagu indikatif RKPD karena perluasan cakupan pembinaan dan peningkatan kapasitas

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan & Peningkatan Kapasitas Kader PKK	1 Tahun	650.000	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Pembinaan & Peningkatan Kapasitas Kader PKK	1	Tahun	758.021,672	kader/kelembagaan (PKK) dalam mendukung Keluarga Berkualitas dan pemenuhan hak anak. Fokus intervensi diperkuat pada penguatan kelembagaan layanan peningkatan kualitas keluarga di tingkat kabupaten/kota, sehingga memerlukan dukungan operasional, pelatihan berjenjang, serta pendampingan berkelanjutan.
	2.08.04.2.02.0007 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1 Lembaga	650.000	2.08.04.2.02.0007 peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	1	lembaga	758.021,672	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	100%	25.000	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Salatiga	Persentase Perangkat Daerah yg berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	100	%	44.130,00	Kebutuhan anggaran meningkat seiring penguatan implementasi SIGA (pengumpulan,

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Penyusunan Data SIGA	1 Dokumen	25.000	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Penyusunan Data SIGA	1	Dokumen	44.130,00	pengolahan, analisis, dan penyajian data) untuk menjamin ketersediaan data terpilah gender dan anak yang mutakhir dan berkualitas. Diperlukan penguatan komitmen dan kontribusi perangkat daerah (walidata sektoral) agar integrasi data lintas OPD berjalan optimal dan mendukung perencanaan berbasis data (PPRG, KLA, SPM/SDGs).
	2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	25.000	2.08.05.2.01.0003 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dokumen	44.130,00	
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase kelembagaan forum anak yang aktif	100%	102.223,40	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Salatiga	Persentase kelembagaan forum anak yang aktif	100	%	333.553,54	
	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Kelembagaan Kelurahan & Kecamatan menuju Layak Anak	1 Tahun	18.409,30	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	Kelembagaan Kelurahan & Kecamatan menuju Layak Anak	1	Tahun	45.000,00	Terdapat perbedaan signifikan antara pagu indikatif RKPD 2027 (Rp102,22 jt) dan hasil analisis kebutuhan (Rp333,55 jt) akibat penambahan subkegiatan advokasi,

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	2.08.06.2.01.0007 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	18.409,30	2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	lembaga	45.000,00	sosialisasi, serta pendampingan penguatan lembaga penyedia layanan PHA yang belum seluruhnya terakomodir dalam RKPD. Struktur subkegiatan pada hasil analisis kebutuhan lebih rinci (termasuk pendampingan lembaga layanan) sehingga memerlukan penyesuaian nomenklatur dan besaran anggaran agar selaras dengan kebutuhan riil lapangan serta target capaian PHA/KLA (NSPK-SPM/SDGs).
	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1 Tahun	83.814,10	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	Peningkatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	1	Tahun	288.553,544	
						2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan	Salatiga	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan	1	lembaga	40.000,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
						Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				
	2.08.06.2.02.0013 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Ko		Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1 Lembaga	83.814,10	2.08.06.2.02.0013 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Ko		Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	1	lembaga	83.814,10	
						2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	1	lembaga	164.739,44	
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	100%	105.946,60	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Salatiga	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	100	%	341.670,11	Terjadi kenaikan kebutuhan anggaran yang signifikan dari pagu indikatif RKPD 2027

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
						2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Peningkatan pelembagaan penanganan kasus kekerasan berbasis masyarakat	1	Tahun	25.000,00	(Rp72,78 jt) menjadi hasil analisis kebutuhan (Rp341,67 jt) karena penambahan dan perincian subkegiatan layanan komprehensif korban (pengaduan/penjangkauan, pendampingan tenaga ahli, medikolegal, gelar kasus, rumah perlindungan, layanan kesehatan non-BPJS, dan pemulihan korban) yang belum seluruhnya terakomodir dalam RKPD.
						2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Salatiga	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	1	dok	25.000,00	
	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Perlindungan terhadap anak	1 Tahun	20.101,40	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Perlindungan terhadap anak	1	Tahun	199.670,11	
						2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10	orang	25.000,00	Hasil analisis kebutuhan menambahkan subkegiatan pencegahan (koordinasi-sinkronisasi) serta penguatan jejaring dan KIE

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
						2.08.07.2.02.0009 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	10	orang	25.000,00	perlindungan khusus anak, sehingga diperlukan penyesuaian nomenklatur, indikator, dan besaran anggaran agar selaras dengan NSPK/SPM layanan PPA serta kebutuhan riil penanganan kasus di lapangan.
						2.08.07.2.02.0010 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	10	orang	21.000,00	
						2.08.07.2.02.0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10	orang	22.568,705	
						2.08.07.2.02.0012 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	10	orang	21.000,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
						2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10	orang	23.000,00	
						2.08.07.2.02.0014 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10	orang	21.000,00	
						2.08.07.2.02.0015 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	10	orang	21.000,00	
	2.08.07.2.02.0017 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	20 Orang	20.101,40	2.08.07.2.02.0017 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota		Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	20	orang	20.101,40	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Pelayanan panangan kasus kekerasan	1 Tahun	85.845.200	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Pelayanan panangan kasus kekerasan	1	Tahun	117.000,00	
						2.08.07.2.03.0009 koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Salatiga	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	1	dok	22.000,00	
						2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Salatiga	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	1	Dokumen	30.000,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	2.08.07.2.03.0015 Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	3 Lembaga	85.845,20	2.08.07.2.03.0011 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	7	lembaga	65.000,00	
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase OPD yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen Perencanaan daerah	100	183.125	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Salatiga	Persentase OPD yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen Perencanaan daerah	100	%	512.771,63	Terdapat kenaikan kebutuhan anggaran yang signifikan dari pagu indikatif RKPD (±Rp146,40 jt) menjadi hasil analisis kebutuhan (±Rp512,77 jt) seiring dengan penajaman intervensi GDPK 5 Pilar, penguatan pendidikan kependudukan (jalur formal, nonformal,
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100				Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100	%		
			Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	0,07				Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	0,07	%		

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
			Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23				Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23	Tahun		informal), advokasi pemanfaatan kajian dampak kependudukan, serta penguatan sistem data keluarga (SIK) yang belum terakomodir optimal dalam RKPD. Hasil analisis kebutuhan memuat perincian subkegiatan tambahan (implementasi pendidikan kependudukan jalur informal, penyusunan GDPK kab/kota, advokasi lintas pemangku kepentingan, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pembinaan-pengawasan SIK, pengolahan &
	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		Tercapainya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	1 Tahun	120.000	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Salatiga	Tercapainya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	1	Tahun	157.771,626	
						2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Salatiga	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1	Kegiatan	30.000,00	
						2.14.02.2.01.0025 Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Salatiga	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	40.000,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						2.14.02.2.01.0027 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Salatiga	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	4 Satuan Pendidikan	67.771,626	pelaporan data lapangan/KB) sehingga nomenklatur, indikator keluaran, dan besaran anggaran perlu diselaraskan dengan kebutuhan riil lapangan serta NSPK/SPM. Penyesuaian target dan anggaran juga dipengaruhi oleh kebutuhan integrasi lintas sektor (Kampung KB, DASHAT, SSK/Pramuka PK/ASN PK/Mass PK) untuk mendukung capaian indikator strategis (integrasi GDPK 5 pilar dalam dokumen perencanaan, cakupan data mikro keluarga, penurunan PUS istri <20 tahun, dan peningkatan MUKP).
						2.14.02.2.01.0028 Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Salatiga	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1 Laporan	20.000,00	
						2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Salatiga	Tercapainya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan	1 Tahun	311.725,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		daerah Kabupaten/Kota			
						2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Salatiga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	Laporan	50.000,00
						2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Salatiga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1	Laporan	36.725,00
						2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Salatiga	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	Dokumen	21.875,00
	2.14.02.2.01.0040 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	23 Kampung KB	8.000	2.14.02.2.01.0040 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas		Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	23	Kampung KB	8.000
	2.14.02.2.01.0041 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi optimalisasi penyelenggaraan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)		Terlaksananya monitoring dan evaluasi optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas	1 laporan	27.000	2.14.02.2.01.0041 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi optimalisasi penyelenggaraan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)		Terlaksananya monitoring dan evaluasi optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas	1	laporan	110.125

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	2.14.02.2.01.0051 Advokasi dan Sosialisasi tentang Hasil Analisis Dampak Kependudukan sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Jumlah advokasi dan sosialisasi tentang hasil analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepeningan	1 laporan	55.000	2.14.02.2.01.0051 Advokasi dan Sosialisasi tentang Hasil Analisis Dampak Kependudukan sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan		Jumlah advokasi dan sosialisasi tentang hasil analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepeningan	1	laporan	55.000	
	2.14.02.2.01.0053P enyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	8.000	2.14.02.2.01.0053 Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	Dokumen	8.000	
	2.14.02.2.01.0055 Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan	1 Dokumen	22.000	2.14.02.2.01.0055 Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli		Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan	1 Dokumen		22.000	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribu)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat					Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat						
	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tercapainya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	63.125	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tercapainya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun		43.275	
	2.14.02.2.02.0011 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah dok data dan informasi keluarga	1 Dokumen	36.725	2.14.02.2.02.0011 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah dok data dan informasi keluarga	1 Dokumen		16.875	
	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah data dan Informasi Keluarga yang tersedianya	1 Dokumen	26.400	2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah data dan Informasi Keluarga yang tersedianya	1 Dokumen		26.400	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Rasio akseptor KB baru	14,50%	298.705	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Salatiga	Rasio akseptor KB baru	14,5	%	2.009.834,73	Terjadi selisih signifikan pagu indikatif RKPD (Rp124,60 jt) dengan hasil analisis kebutuhan (±Rp2,01 miliar) akibat penambahan dan perincian subkegiatan operasional Program Bangga Kencana (balai penyuluhan, rakorcam/rakordes /minilok), advokasi-KIE multiperan, pendayagunaan PKB/PLKB dan kader IMP, penguatan pelayanan KB (distribusi alokon, pembinaan faskes), serta perluasan intervensi Kampung KB/DASHAT yang belum terakomodir dalam RKPD. Hasil analisis kebutuhan memuat
			Angka pemakaian kontrasepsi/CP R bagi perempuan menikah usia 15-49	68,77%				Angka pemakaian kontrasepsi/CP R bagi perempuan menikah usia 15-49	68,77	%		
			Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	8,45%				Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	8,45	%		
			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	27,05%				Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	27,05	%		
			Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	70%				Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	70	%		
			Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	11,20%				Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	11,2	%		
			Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi)	83,50%				Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi)	83,5	%		

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Terlaksananya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1 Tahun	83.600	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Salatiga	Terlaksananya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1	Tahun	435.000,00	subkegiatan tambahan (advokasi pokja, pengelolaan balai penyuluhan, penggerakan IMP, pembinaan pelayanan KB-kespro, operasional Poktan, fasilitasi DASHAT, pengelolaan Bangga Kencana di Kampung KB) dan penajaman target (kenaikan sasaran MKJP, peningkatan kompetensi nakes, peningkatan kesertaan KB pria), sehingga diperlukan penyesuaian nomenklatur, indikator keluaran, serta besaran anggaran agar selaras dengan kebutuhan riil lapangan dan target NSPK.
						2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1	Laporan	90.000,00	
	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	35.000	2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Salatiga	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa	2	Laporan	135.000,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
								(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				
	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	28.600	2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Salatiga	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1	Dokumen	110.000,00	
	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			1 Dokumen	20.000	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Salatiga	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2	Organisasi	100.000,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1 Dokumen	70.000	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Salatiga	Terlaksananya pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	1	Tahun	585.000,00	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1 Dokumen	145.105	2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Salatiga	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	300	Orang	585.000,00	
	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB	1 Tahun	145.105	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB	1	Tahun	754.834,73	
						2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Salatiga	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	Laporan	15.000,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		25.105	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	600	Orang	528.834,73	
						2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Salatiga	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	8	Laporan	5.000,00	
						2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1	Laporan	30.000,00	
						2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Salatiga	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan	40	Orang	35.000,00	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
								Kesehatan Reproduksi				
	2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria		Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	20 orang	120.000	2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria	Salatiga	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	50	Orang	141.000,00	
						2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Salatiga	Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan)	162	Poktan	235.000,00	
						2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Salatiga	Jumlah DASHAT di Kampung KB	23	Unit	73.000,00	
						2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa	Salatiga	advokasi, Kontribusi & Fasilitasi Layanan	23	Kampung	162.000,00	

[illegible]

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
			Memiliki Remaja					Memiliki Remaja				memuat penajaman target (kenaikan jumlah kader terlatih 15→65 orang) dan subkegiatan tambahan (pengadaan sarana kelompok, pemantauan & pendampingan KRS), sehingga diperlukan penyesuaian nomenklatur, indikator keluaran, dan besaran anggaran pada RKPD agar selaras dengan kebutuhan layanan, target kinerja pembangunan keluarga, serta integrasi percepatan penurunan stunting.
	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	1 Tahun	35.000	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Salatiga	Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	1	Tahun	230.000	
	2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	35.000	2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	Laporan	95.000	
						2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Salatiga	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	10	Unit	70.000	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
								Akseptor (UPPKA) yang tersedia				
						2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Salatiga	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	65	Orang	35.000	
						2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1	Laporan	30.000	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
						2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Salatiga	Tercapainya pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1	Tahun	907.741,844	
						2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Salatiga	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1	Laporan	400.000,00	
						2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon	Salatiga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon	1	Laporan	492.741,844	

No	RKPD pada Tahun 2027					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2027						Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribu)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana (ribu)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-6	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
						PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		n PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				
						2.14.04.2.02.0008 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1	Laporan	15.000,00	
				TOTAL	8.290.418.405					TOTAL	13.779.166,367	

2.4. Review terhadap RKPD Kota Salatiga

1. Proses yang dilakukan

Proses analisis dilakukan dengan membandingkan dokumen RKPD Tahun 2027 dengan hasil analisis kebutuhan Tahun 2027. Perbandingan mencakup:

- Program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD vs. hasil analisis kebutuhan.
- Indikator kinerja dan target capaian yang ditetapkan.
- Pagu indikatif (alokasi anggaran dalam RKPD) dibandingkan dengan kebutuhan dana yang dihitung dalam analisis kebutuhan.
- Identifikasi adanya program/kegiatan baru, kesesuaian indikator, serta perbedaan besaran anggaran.

2. Alasan proses tersebut dilakukan

Proses ini penting karena:

- RKPD merupakan dokumen perencanaan resmi pemerintah daerah, sedangkan analisis kebutuhan mencerminkan kondisi riil dan kebutuhan aktual masyarakat/organisasi perangkat daerah.
- Perbandingan dilakukan untuk memastikan kebijakan dan anggaran yang direncanakan benar-benar relevan dengan kebutuhan nyata.
- Menghindari adanya kesenjangan antara rencana dan kebutuhan, baik dari sisi program maupun besaran anggaran.
- Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan, penyesuaian kebijakan, dan rekomendasi perbaikan dalam penyusunan RKPD final.

3. Penjelasan temuan dan catatan penting

Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan antara rumusan RKPD Tahun 2027 dengan kebutuhan riil pelaksanaan program di lapangan, baik dari sisi besaran pagu anggaran, penajaman target indikator kinerja, maupun cakupan kegiatan. Sejumlah kegiatan membutuhkan penguatan dukungan pendanaan, operasional, sarana prasarana, serta peningkatan kapasitas SDM/kader guna memastikan ketercapaian target program prioritas bidang KB, pembangunan keluarga sejahtera, ketahanan keluarga, dan percepatan penurunan stunting.

Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian perencanaan program dan kegiatan pada tahap perumusan RKPD/Renja berikutnya agar lebih

responsif terhadap kebutuhan aktual, sejalan dengan NSPK, serta target pembangunan daerah dan nasional.

Temuan hasil review ini menjadi dasar dalam penyempurnaan rancangan Renja DP3APPKB Tahun 2027, baik dari aspek penajaman indikator kinerja, penentuan lokasi dan sasaran kegiatan, maupun penyesuaian kebutuhan pendanaan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan terhadap usulan yang disampaikan melalui mekanisme musrenbang kelurahan dan kecamatan, masukan pemangku kepentingan, serta hasil pengumpulan aspirasi masyarakat yang relevan dengan tugas dan fungsi DP3APPKB. Proses penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian usulan dengan isu-isu strategis, kewenangan perangkat daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan pendanaan daerah.

1. Proses Perolehan Usulan Pemangku Kepentingan

Usulan yang masuk merupakan hasil dari beberapa mekanisme partisipatif dan proses pengumpulan informasi, antara lain:

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota, yang dihadiri oleh kelompok masyarakat, kader, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, forum anak, dan perwakilan keluarga berisiko stunting.
- b. Forum Perangkat Daerah (FPD) yang melibatkan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, mitra pembangunan, serta perangkat daerah lintas urusan.
- c. Pengumpulan data lapangan (rapid assessment) melalui kunjungan pada lokasi layanan seperti Balai Penyuluh KB, Kampung KB, kelompok UPPKA, dan Rumah Dataku.
- d. Observasi dan pemantauan oleh perangkat daerah provinsi yang memberikan informasi tambahan mengenai kebutuhan layanan dan kondisi infrastruktur pelayanan.
- e. Dokumentasi usulan yang disampaikan secara langsung oleh komunitas kelompok rentan, seperti kelompok perempuan kepala keluarga, remaja, kelompok KB pria, kader IMP, serta pengelola UPPKA.

Melalui proses tersebut, seluruh usulan dihimpun, diverifikasi, dan kemudian dianalisis berdasarkan relevansi dengan tugas pokok dan fungsi DP3APPKB serta kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja daerah.

2. Penjelasan Kesesuaian Usulan dengan Isu Strategis dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa sebagian besar usulan pemangku kepentingan memiliki relevansi tinggi dengan isu strategis DP3APPKB, terutama pada bidang Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, Perlindungan perempuan dan anak, Peningkatan kualitas keluarga, Program Bangga Kencana, Penurunan stunting, Penguatan pelaksanaan layanan berbasis kampung/kelurahan. Keterkaitan usulan tersebut dengan tugas dan fungsi OPD dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penguatan Lembaga Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PPEP)

Usulan untuk Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (Rp 25.000.000) merupakan kebutuhan yang selaras dengan mandat DP3APPKB dalam pelebagaan PUG dan penguatan ekonomi perempuan. Usulan ini relevan untuk merespons isu rendahnya kemandirian ekonomi perempuan, terutama kelompok rentan.

b. Peningkatan Kualitas Keluarga

Usulan tambahan kegiatan Tim Penggerak PKK sebesar Rp500.000.000 sejalan dengan isu strategis daerah, khususnya penguatan kualitas keluarga, percepatan penurunan stunting, pencegahan perkawinan usia anak, peningkatan ketahanan keluarga, serta penguatan peran masyarakat dalam pembangunan keluarga. PKK memiliki jejaring kader hingga tingkat kelurahan yang efektif menjangkau keluarga sasaran, sehingga menjadi instrumen strategis dalam memperluas jangkauan layanan, edukasi, pendampingan keluarga berisiko, serta penguatan pengasuhan dan kesehatan keluarga.

c. Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas dan Upaya Penurunan Stunting

Usulan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Rp 100.000.000) memenuhi isu strategis penurunan stunting dan penguatan intervensi keluarga berisiko. Inovasi Warung Peduli Cegah Stunting (Penting) yang diusulkan kader DASHAT dan telah memiliki embrio di empat kelurahan (Blotongan, Kutoarjo Lor, Kecandran, Tegalrejo) menunjukkan kesesuaian dengan pendekatan pemberdayaan keluarga dan ekonomi komunitas. Usulan ini juga memiliki nilai tambah karena telah memperoleh dukungan stimulan pihak ketiga (FISKOM UKSW dan bantuan peralatan dari DP3APPKB), sehingga layak diprioritaskan.

d. Peningkatan Kesertaan KB Pria

Usulan peningkatan kesertaan KB Pria (Rp 20.000.000). Penguatan kelompok KB Pria sejalan dengan isu strategis daerah dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi, penurunan unmet need, serta penguatan peran laki-laki dalam pembangunan keluarga dan kesetaraan gender. Rendahnya partisipasi KB pria masih menjadi tantangan dalam pencapaian indikator mCPR, MKJP, dan demand satisfied. Oleh karena itu, intervensi yang terarah melalui penguatan kelompok KB pria diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik ber-KB pada laki-laki, sekaligus mengurangi beban kontrasepsi yang selama ini didominasi oleh perempuan.

Dari aspek tugas dan fungsi Perangkat Daerah (DP3APPKB), penguatan kelompok KB pria merupakan bagian integral dari mandat pelaksanaan Program Bangga Kencana, khususnya pada fungsi advokasi, KIE, pendayagunaan PKB/PLKB, penggerakan peran serta masyarakat, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB, termasuk metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Melalui penguatan kelompok KB pria berbasis komunitas (tokoh masyarakat, tempat kerja, komunitas pemuda, dan Kampung KB), DP3APPKB dapat memperluas jangkauan layanan, memperkuat perubahan perilaku, serta meningkatkan keberlanjutan kepesertaan KB pria. Upaya ini mendukung pencapaian target kinerja daerah, NSPK

BKKBN, SPM terkait urusan pengendalian penduduk dan KB, serta berkontribusi pada pencapaian SDGs, khususnya tujuan kesehatan yang baik dan kesejahteraan serta kesetaraan gender.

e. Peningkatan Kesertaan KB Pria – Medis Operasi Pria (MOP)

Usulan pemberian reward bagi akseptor MOP merupakan respon strategis terhadap isu rendahnya partisipasi KB pria yang berdampak pada masih timpangnya peran gender dalam pengendalian kelahiran serta belum optimalnya capaian indikator mCPR, MKJP, demand satisfied, dan penurunan unmet need. MOP sebagai metode kontrasepsi jangka panjang yang efektif dan aman masih menghadapi hambatan sosial-budaya, persepsi negatif, serta minimnya insentif non-medis bagi calon akseptor. Pemberian reward diharapkan menjadi stimulus untuk meningkatkan minat dan keberanian laki-laki berpartisipasi aktif dalam KB, sekaligus memperkuat perubahan norma sosial bahwa tanggung jawab perencanaan keluarga adalah peran bersama suami dan istri.

Dari sisi tugas dan fungsi DP3APPKB, usulan ini selaras dengan mandat pelaksanaan Program Bangga Kencana, khususnya fungsi pengendalian dan pendistribusian pelayanan KB, peningkatan kesertaan KB pria, advokasi dan KIE kesehatan reproduksi, serta pendayagunaan PKB/PLKB dan jejaring layanan di fasilitas kesehatan. Skema reward MOP dapat diintegrasikan dengan kegiatan pelayanan KB (Safari KB, pelayanan MKJP, promosi KIE, dan pembinaan jejaring layanan), sehingga memperkuat efektivitas intervensi yang sudah ada. Implementasi kebijakan ini mendukung pencapaian target kinerja daerah, NSPK BKKBN, SPM urusan pengendalian penduduk dan KB, serta berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, khususnya tujuan kesehatan yang baik, kesetaraan gender, dan penguatan keluarga berkualitas.

f. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Usulan kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar Rp15.105.000 selaras dengan isu strategis daerah dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi, serta penguatan ketahanan keluarga. Rendahnya proporsi peserta KB

MKJP dan masih tingginya dominasi metode jangka pendek berdampak pada tingginya risiko kehamilan tidak direncanakan dan drop out KB. Kegiatan ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi DP3APPKB dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan akses serta kualitas pelayanan KB, serta pelaksanaan advokasi, KIE, dan fasilitasi layanan MKJP sesuai arah kebijakan program Bangga Kencana yang dikoordinasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- g. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

Usulan kegiatan sosialisasi Forum GenRe (ForGenre) dan pertemuan Duta GenRe (Rp15.000.000) merupakan respon strategis terhadap isu masih tingginya kerentanan remaja terhadap perilaku berisiko, seperti perkawinan usia anak, kehamilan tidak diinginkan, putus sekolah, serta penyalahgunaan NAPZA, yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia dan pencapaian indikator pembangunan kependudukan di daerah. Di sisi lain, tantangan bonus demografi menuntut penguatan peran remaja sebagai agen perubahan (agent of change) yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup (life skills) untuk merencanakan pendidikan, karier, dan kehidupan berkeluarga secara matang. Penguatan kapasitas ForGenre dan Duta GenRe melalui sosialisasi dan pertemuan koordinatif menjadi instrumen penting untuk memperluas jangkauan KIE kesehatan reproduksi remaja dan penguatan karakter remaja di komunitas, sekolah, serta media sosial.

Dari perspektif tugas dan fungsi DP3APPKB, usulan ini selaras dengan mandat pelaksanaan Program Bangga Kencana pada segmentasi remaja, khususnya fungsi pembinaan dan pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), penguatan kelembagaan GenRe, serta pelaksanaan advokasi, KIE, dan pendampingan kelompok sasaran remaja. Kegiatan sosialisasi ForGenre dan pertemuan Duta GenRe juga memperkuat koordinasi lintas sektor (pendidikan, kepemudaan, kesehatan, organisasi pemuda) dan jejaring mitra, sehingga intervensi pencegahan

permasalahan remaja menjadi lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan demikian, usulan ini berkontribusi langsung pada pencapaian target kinerja perangkat daerah terkait penurunan perkawinan usia anak, peningkatan partisipasi remaja dalam PIK-R/GenRe, serta peningkatan Indeks Pembangunan Kepemudaan dan kualitas generasi muda di daerah.

h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pelayanan (Balai Penyuluh KB dan UPTD PPA)

Usulan pemeliharaan fasilitas pelayanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp290.000.000 ini sangat relevan untuk menjawab tingginya kebutuhan pelayanan publik saat ini. Kondisi fisik bangunan balai penyuluh dan fasilitas UPTD PPA harus senantiasa memenuhi standar layanan yang layak anak, ramah perempuan, serta responsif terhadap penanganan psikososial, sehingga sangat membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Penyediaan lingkungan pelayanan yang aman, representatif, dan terjaga privasinya merupakan faktor krusial dalam mendukung keberhasilan proses pendampingan serta pemulihan psikologis klien. Usulan pemeliharaan ini secara langsung mendukung perwujudan mandat DP3APPKB sebagai garda terdepan penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak. Lebih lanjut, perawatan sarana prasarana yang terencana ini menjadi langkah penting untuk menjaga usia pakai aset agar tetap berfungsi optimal dan mencegah kerusakan yang lebih parah di masa mendatang. Melalui ketersediaan fasilitas yang terstandardisasi, diharapkan kualitas intervensi program perlindungan masyarakat dapat berjalan secara semakin efektif dan komprehensif.

i. Pengadaan Peralatan Komputer dan Printer (4 Balai Penyuluh KB dan Rumah Dataku)

Usulan pengadaan peralatan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional pencatatan, pelaporan, dan pemutakhiran data keluarga secara berkelanjutan. Keberadaan sarana dan prasarana digital yang memadai ini akan meningkatkan efisiensi kerja, akurasi, serta integrasi pemrosesan data di lapangan. Pemenuhan kebutuhan tersebut selaras dengan tugas teknis DP3APPKB dalam penyediaan Sistem Informasi Keluarga dan

pengelolaan Rumah Dataku sebagai pusat data kependudukan. Melalui ketersediaan fasilitas teknologi yang optimal, data keluarga yang dihasilkan dapat disajikan secara *real-time* dan valid untuk dijadikan landasan perumusan kebijakan pembangunan. Dengan demikian, langkah penguatan infrastruktur ini diharapkan mampu mengoptimalkan kualitas pelayanan publik serta keberhasilan program pemberdayaan keluarga secara menyeluruh.

j. Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Keluarga Sejahtera melalui FASEPDU

Usulan penerbitan buku FASEPDU (Rp 20.000.000) relevan dengan kebutuhan edukasi keluarga dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai keluarga sejahtera dan berkualitas. Upaya ini memperkuat fungsi sosialisasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) DP3APPKB.

k. Peningkatan Kepesertaan KB Pria

Usulan Gerakan Ayah Teladan (Rp 20.000.000) merupakan bagian dari strategi nasional peningkatan partisipasi pria dalam KB. Usulan ini sangat relevan karena keterlibatan pria masih rendah dan membutuhkan pendekatan kultural berbasis kelompok.

Berikut ini disajikan tabel yang memuat rincian usulan program dan kegiatan yang telah dihimpun dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Usulan-usulan tersebut merupakan representasi dari aspirasi serta kebutuhan prioritas di lapangan yang diharapkan dapat terakomodasi dalam perencanaan. Rincian data di dalam tabel ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif sebagai bahan acuan dan pertimbangan strategis pada tahapan selanjutnya.

Tabel Usulan Program Kegiatan dari Pemangku Kepentingan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Salatiga	Persentase Kelembagaan PUG aktif		
	2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	Pembinaan Organisasi Perempuan, Pendidikan & Pelatihan Keterampilan		
1	2.08.02.2.03.0007 Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Salatiga	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	25.000.000	1 kelompok PEP
B	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Salatiga	Persentase PKK aktif		
2	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Pembinaan & Peningkatan Kapasitas Kader PKK	500.000.000	1 lembaga
C	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Salatiga	Persentase OPD yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen Perencanaan daerah		
		Salatiga	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Tercapainya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah Kabupaten/Kota		
3	2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Salatiga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	36.725.000	Sosialisasi pencatatan dan pengumpulan data keluarga 10 petugas dan pemenuhan sarpras pendataan
D	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Salatiga	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)		
	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Salatiga	Operasional Ketahanan Keluarga berbasis Kelompok Kegiatan (Poktan)		
4	2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Salatiga	Jumlah DASHAT di Kampung KB	73.000.000	sosialisasi, rakor antar wilayah, stimulus 25 kel x 2 orang
	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Salatiga	Terlaksananya advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal		
5	2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Salatiga	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	20.000.000	Fapsedu, rapat koordinasi antar wilayah 30 orang di luar kota

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Salatiga	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan KB		
6	2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Salatiga	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15.105.000	pertemuan dengan faskes 40 orang x 3 kali
7	2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria	Salatiga	advokasi, Kontribusi & Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Perempuan	20.000.000	Penguatan kelompok KB Pria 30 orang X 2 kali
8	2.14.03.2.03.0013 Peningkatan Kesertaan KB Pria	Salatiga		81.000.000	Reward untuk penguatan kesertaan KB Pria 27 orang x 3 juta
E	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Salatiga	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja		
	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Salatiga	Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan		

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7.500.000	sosialisasi untuk for genre 30 org x 4 kali
10	2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Salatiga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	7.500.000	Pertemuan duta genre 30 org x 4 kali
11	2.08.01.2.07.009Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Salatiga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	290.000.000	relevan dengan kebutuhan pelayanan publik. Kondisi bangunan balai penyuluh dan fasilitas UPTD PPA yang harus memenuhi standar layanan layak anak, perempuan, dan layanan psikososial membutuhkan peningkatan sarana prasarana yang memadai. Usulan ini mendukung mandat DP3APPKB sebagai penyedia layanan perlindungan
			TOTAL	1.075.830.000	

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa sebagian besar usulan berkaitan dengan peningkatan kapasitas keluarga, penguatan peran remaja di lingkungan masyarakat, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Usulan-usulan tersebut pada prinsipnya sejalan dengan arah kebijakan DP3APPKB, sehingga dapat diakomodir dalam program dan kegiatan Tahun 2027 secara selektif dan terukur sesuai dengan prioritas pembangunan dan ketersediaan sumber daya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan DP3APPKB selaras dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Prioritas Nasional (PN), maupun dokumen turunan lainnya. Penelaahan ini mencakup analisis keterkaitan antara prioritas nasional dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DP3APPKB, serta relevansi program dan aktivitas yang diimplementasikan pada tingkat daerah. Hasil telaahan menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan oleh DP3APPKB memiliki kesesuaian langsung dengan sasaran strategis pembangunan nasional khususnya pada sektor pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, penurunan stunting, dan penguatan sistem data.

1. Prioritas Nasional: Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi

Fokus prioritas nasional ini menekankan penguatan tata kelola pemerintahan, efektivitas birokrasi, serta integrasi sistem data untuk mendukung perumusan kebijakan publik. Dalam konteks DP3APPKB, prioritas ini diakomodasi melalui dua program strategis:

- a. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan aktivitas Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA). Aktivitas ini mendukung penyediaan data terpilah gender dan anak untuk mendukung perencanaan berbasis bukti (evidence-based policy). SIGA menjadi instrumen penguatan tata kelola data daerah dan merupakan amanat RPJMN untuk digitalisasi sistem pelayanan publik.
- b. Program Pengendalian Penduduk dengan aktivitas Pemutakhiran data keluarga berbasis aplikasi. Kegiatan ini sejalan dengan agenda nasional digitalisasi data keluarga melalui aplikasi resmi BKKBN, memastikan Tersedianya data terkini dalam pemetaan sasaran pelayanan KB, keluarga berisiko stunting, serta intervensi ketahanan keluarga.

Kesimpulan:

Kedua aktivitas tersebut memenuhi mandat prioritas nasional terkait peningkatan kualitas birokrasi, perbaikan tata kelola data, dan efisiensi koordinasi lintas sektor.

2. Prioritas Nasional: Pemberantasan Kemiskinan

Pemberantasan kemiskinan dalam RPJMN menekankan penguatan keluarga, peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat, dan intervensi berkelanjutan terhadap kelompok rentan. DP3APPKB berkontribusi melalui:

- a. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan aktivitas Pelayanan KB MKJP. Penggunaan MKJP terbukti menurunkan risiko kehamilan yang tidak direncanakan, menekan angka putus sekolah, serta memperkuat stabilitas ekonomi keluarga. Kegiatan ini sejalan dengan strategi nasional pengendalian fertilitas untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi.
- b. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan aktivitas Pelatihan teknis bagi pelaksana BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R Pemberdayaan ekonomi kelompok UPPKA. Kegiatan ini mendukung peningkatan kapasitas keluarga dan pemberdayaan ekonomi akseptor, sesuai arahan nasional untuk memperkuat UMKM keluarga, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kerentanan sosial ekonomi.

Kesimpulan:

Seluruh aktivitas berada dalam koridor strategi nasional untuk pengurangan kemiskinan melalui peningkatan literasi keluarga, pengendalian fertilitas, serta pemberdayaan ekonomi perempuan dan keluarga akseptor KB.

3. Prioritas Nasional: Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat

Kebijakan nasional mengarahkan peningkatan akses layanan kesehatan inklusif, percepatan penurunan stunting, dan pemanfaatan teknologi kesehatan. Keterkaitan dengan program DP3APPKB meliputi:

- a. Program Pembinaan KB dengan aktivitas kampanye KB, pelayanan MKJP, pendataan keluarga digital selaras dengan target Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN

PASTI) dan Strategi Nasional Penurunan Stunting, serta perluasan akses terhadap informasi dan layanan KB modern.

- b. Program Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dengan aktivitas Posyandu Lansia, Sekolah Lansia, Lansia Mandiri Tanpa Didampingi (LARI PAGI). Mendukung prioritas nasional tentang kesehatan lansia dan penuaan sehat (healthy ageing), melalui pendekatan promotif dan preventif di tingkat keluarga dan komunitas.
- c. Program Pembinaan KB–Rakorcam/Minilok dengan aktivitas kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Merupakan mandat nasional dalam percepatan penurunan stunting berbasis keluarga dan kelurahan.
- d. Pemantauan dan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting dengan aktivitas Bantuan operasional TPK. Aktivitas ini langsung mendukung sasaran nasional 14% prevalensi stunting, melalui pendampingan calon pengantin, ibu hamil, pasca salin, dan balita.

Kesimpulan:

Seluruh aktivitas berkontribusi nyata terhadap pemenuhan prioritas nasional di bidang kesehatan keluarga, penurunan stunting, dan kualitas layanan KB.

4. Prioritas Nasional: Penguatan Pendidikan, Sains, Teknologi, dan Digitalisasi

Dengan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dengan aktivitas Pembinaan PIK-R. Mendukung kebijakan nasional penguatan pendidikan keluarga dan pendidikan kesehatan reproduksi remaja melalui Pendekatan peer educator. Pembinaan PIK-R juga memperkuat literasi digital remaja dalam pencegahan risiko tiga dosa besar remaja (pernikahan dini, seks pranikah, penyalahgunaan narkoba).

5. Prioritas Nasional: Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas

Prioritas ini sangat relevan dengan tupoksi DP3APPKB. Kesesuaiannya meliputi:

- a. Program Pemenuhan Hak Anak dengan aktivitas Pembentukan Forum Anak, Penguatan KLA. Mendukung target nasional Kota Layak Anak dan penguatan partisipasi anak dalam pembangunan.

- b. Program Pengarusutamaan Gender dengan aktivitas Pelatihan PPRG, pembentukan Pokja PUG. Sejalan dengan kebijakan nasional untuk mengarusutamakan gender dalam perencanaan dan penganggaran (Gender Budget Tagging).
- c. Program Perlindungan Perempuan dengan aktivitas Pencegahan KtP/TPPO, layanan pendampingan, rumah perlindungan. Sangat relevan dengan prioritas nasional perlindungan korban kekerasan, penghapusan perdagangan orang, dan pemulihan korban berbasis layanan terintegrasi (one-stop service).
- d. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan aktivitas Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL). Mendukung penguatan fungsi pengasuhan, pendidikan keluarga, dan ketahanan keluarga sesuai kebijakan nasional pembangunan keluarga.

6. Prioritas Nasional: Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan aktivitas Pelatihan Produktivitas Ekonomi Perempuan. Kegiatan ini mendorong perempuan sebagai pelaku ekonomi produktif, selaras dengan arah pembangunan nasional dalam penguatan UMKM perempuan dan literasi kewirausahaan.

Kesimpulan Umum Telaahan bahwa seluruh program dan kegiatan DP3APPKB memiliki kesesuaian langsung dengan kebijakan nasional dalam RPJMN dan prioritas nasional. Terdapat kontribusi strategis DP3APPKB pada enam prioritas nasional, khususnya dalam isu: Digitalisasi data kependudukan dan SIGA, Penurunan kemiskinan melalui KB dan UPPKA, Penurunan stunting, Pembangunan keluarga, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kegiatan yang direncanakan bersifat komplementer terhadap target nasional, sehingga memperkuat kesinambungan kebijakan pusat-daerah. Program dan aktivitas juga mendukung pencapaian SDGs, terutama tujuan 1, 3, 4, 5, 10, dan 16.

Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional	Program	Aktivitas
1	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)
		2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemutakhiran data keluarga berbasis aplikasi
2	Pemberantasan kemiskinan	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	pelayanan KB MKJP
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); Orientasi dan Pelatihan Bagi Pengelola Kelompok UPPKA
3	Pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kampanye KB, pelayanan KB MKJP, dan pendataan keluarga berbasis digital
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Posyandu Lansia, Sekolah Lansia, LARI PAGI (Lansia Mandiri Tanpa di Dampingi)
		2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting ,
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Bantuan Operasional kepada Tim Pendamping Keluarga
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pendampingan dan monev oleh Tim Pendamping Keluarga
4	Penguatan pendidikan, sains,	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Pembinaan PIK-R

No	Prioritas Nasional	Program	Aktivitas
	teknologi, dan digitalisasi	KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
5	Kesetaraan gender, perlindungan perempuan, anak, dan disabilitas	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pembentukan Forum Anak; Penguatan kelembagaan KLA, integrasi dengan sekolah
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia
		2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelatihan PPRG, pembentukan Pokja PUG
		2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Layanan Medikolegal , Layanan Pendampingan Tenaga Ahli;Layanan Rumah Perlindungan ; Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban ; Layanan Gelar Kasus (case conference) ;Layanan kesehatan bagi korban yang tidak dijamin BPJS dan sumber pendanaan lainnya; Layanan spesifik untuk pemulihan korban
		2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Sosialisasi pencegahan KDRT, penguatan Satgas PPA, layanan rujukan terpadu
6	Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan

3.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan Provinsi dilakukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dapat diintegrasikan secara sinergis dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DP3APKB Kota Salatiga. Telaahan ini menjadi dasar penajaman perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga implementasi pembangunan

bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana dapat berjalan efektif, terukur, dan konsisten dengan agenda pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Secara umum, kebijakan Provinsi menekankan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif, peningkatan kualitas SDM melalui model pembangunan keluarga yang inklusif, pemerataan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat, serta pemenuhan hak-hak dasar perempuan, anak, dan kelompok rentan. Dalam konteks tersebut, DP3APPKB memiliki kontribusi strategis melalui penyediaan layanan berbasis keluarga, revitalisasi kelembagaan, serta penguatan data dan sistem informasi. Adapun telaahan lebih rinci per prioritas Provinsi disajikan sebagai berikut.

1. Prioritas Provinsi: Good Clear Government & Collaborative Governance

Arah kebijakan Provinsi menekankan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, serta berbasis kinerja. Dalam ruang lingkup DP3APPKB, orientasi ini terimplementasi melalui Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), khususnya kegiatan pelebagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dunia usaha, dan media. Subkegiatan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan PHA merupakan instrumen strategis memperkuat governance melalui:

- a. peningkatan kapasitas ASN dan kader lapangan dalam manajemen kinerja,
- b. penguatan Forum Anak sebagai wadah partisipasi bermakna, dan
- c. pengembangan RPPA Kecamatan Berdaya sebagai inovasi kolaboratif layanan perlindungan anak berbasis wilayah.

Dengan demikian, DP3APPKB memiliki kontribusi langsung terhadap penguatan tata kelola pelayanan publik yang inklusif dan berbasis data.

2. Prioritas Provinsi: Pesantren Obah

Prioritas ini diarahkan untuk memperkuat peran pesantren sebagai pusat pengembangan SDM yang berkualitas. Keterkaitan dengan tupoksi DP3APPKB tercermin melalui Program PHA, khususnya subkegiatan penguatan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak. Implementasinya berupa Program Pesantren Ramah Anak, yang berfungsi:

- a. mendorong pengarusutamaan hak anak pada lembaga pendidikan keagamaan,
- b. memperluas cakupan satuan pendidikan yang ramah anak,
- c. memperkuat jejaring perlindungan anak berbasis komunitas pesantren.

DP3APPKB berperan sebagai fasilitator dan pembina teknis, sehingga kebijakan Provinsi dapat terimplementasi secara efektif di tingkat kota.

3. Prioritas Provinsi: Desa Maju dan Berdaya

Prioritas ini berfokus pada peningkatan kapasitas desa/ kelurahan sebagai basis pembangunan masyarakat. Keterkaitan dengan tugas DP3APPKB ditunjukkan melalui program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Beberapa aktivitas strategis meliputi pembinaan Kampung KB Mandiri, penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK), pemanfaatan Sistem Informasi Keluarga (SIGA), pelaksanaan Kelas Orang Tua Hebat (BKB dan ibu balita), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), Lansia Berdaya (SIDAYA), sosialisasi Lansia Mandiri Tanpa Didampingi (LARI PAGI) kepada kelompok lansia, serta pelatihan teknis bagi kader BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan UPPKA. Keterlibatan DP3APPKB memperkuat pendekatan pembangunan keluarga sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat desa/kelurahan, sekaligus mendukung tujuan Provinsi dalam mewujudkan kemandirian desa.

4. Prioritas Provinsi: Pelayanan Kesehatan Paripurna (Asuransi Gratis)

Provinsi mendorong peningkatan akses layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. DP3APPKB mendukung prioritas ini melalui Program KB, terutama subkegiatan peningkatan kesertaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Aktivitas pelayanan KB gratis menjadi mekanisme nyata untuk:

- a. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi,
- b. Menurunkan unmet need KB,
- c. Mendorong pengendalian kelahiran yang berkontribusi pada peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Sinergi ini memperkuat integrasi layanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga.

5. Prioritas Provinsi: Taruna Karya Mandiri (Kartu Zilenial)

Prioritas ini berorientasi pada peningkatan kualitas generasi muda, termasuk penguatan kapasitas remaja dalam ketahanan keluarga dan kesiapan kerja. Relevansi dengan DP3APPKB tercermin dalam kegiatan pemberdayaan remaja.

Aktivitas strategis meliputi:

- a. Pelatihan teknis bagi pengelola kegiatan ketahanan keluarga (termasuk PIK-R),
- b. Pengembangan PIK jalur pendidikan dan jalur mahasiswa,
- c. Pembinaan Saka Kencana,

Kegiatan-kegiatan tersebut mendukung pembentukan generasi muda yang produktif, berkarakter, dan adaptif terhadap perubahan sosial ekonomi.

6. Prioritas Provinsi: Pendidikan Berkualitas & Merata

Kebijakan Provinsi menekankan peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan termasuk pelibatan anak secara aktif dalam pembangunan. Kontribusi DP3APPKB tercermin melalui Program Pemenuhan Hak Anak, terutama penguatan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak. Aktivitas yang dilakukan meliputi:

- a. Pelibatan anak dalam Festival Anak Salatiga,
- b. Jambore Bersih Lingkungan,
- c. Deklarasi Satuan Pendidikan menuju Sekolah Ramah Anak (SRA),
- d. Musrenbang Anak, serta berbagai forum koordinasi lintas tingkat (kota, kecamatan, kelurahan).

Kegiatan tersebut memastikan hak partisipasi anak terpenuhi dan semakin menguatkan ekosistem pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak.

Kesimpulan Telaahan terhadap kebijakan Provinsi menunjukkan bahwa seluruh prioritas pembangunan Jawa Tengah memiliki keterkaitan yang erat dengan mandat DP3APPKB. Hal ini membuka ruang bagi penguatan integrasi perencanaan, pemantapan kelembagaan, serta peningkatan kualitas layanan publik dalam bidang pengendalian penduduk, pembangunan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Seluruh program dan aktivitas yang diidentifikasi menjadi dasar bagi DP3APPKB dalam menyusun rencana kerja tahunan yang selaras dengan prioritas pembangunan Provinsi, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan efektif, sinergis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Provinsi tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas Provinsi

No	Prioritas Provinsi	Program	Aktivitas
1	Good Clear Government & Collaborative Governance	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Pelatihan manajemen kinerja ASN dan kader lapangan; Peningkatan Kapasitas Forum Anak terkait Kecerdasan Emosional; pengembangan RPPA Kecamatan Berdaya
2	Pesantren Obah	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Program Pesantren Ramah Anak
3	Desa Maju dan Berdaya	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pembinaan Kampung KB Mandiri; Penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK); Penggunaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)Pelibatan Fapsedu
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kelas Orang Tua Hebat (Kader BKB dan Ibu Balita); Sosialisasi LARI PAGI (Lansia Mandiri Tanpa di Dampingi (Kelompok BKL dan Sekolah Lansia); Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI); Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA); Lansia Berdaya (SIDAYA)
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA
4	Pelayanan Kesehatan Paripurna (Asuransi Gratis)	2.14.03 PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Pelayanan KB gratis;

No	Prioritas Provinsi	Program	Aktivitas
5	Taruna Karya Mandiri (Kartu Zilenial)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA); PIK Jalur Mahasiswa ; PIK Jalur Pendidikan ; Pembinaan Saka Kencana ; Temu Kader PIK R/
6	Pendidikan Berkualitas & Merata	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA),2.08.06.2.02 Keg Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, 2.08.06.2.02.0009 sub Keg pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelibatan anak dalam kegiatan festival anak salatiga sebagai ajang kreativitas anak, My Super Camp Forum Anak (FA)Salatiga ; Jambore Bersih Lingkungan FA Salatiga ; Deklarasi Satuan Pendidikan Menuju SRA; Musrenbang FA Salatiga ; Rakor FA tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi DP3APPKB pada tahun perencanaan dihadapkan pada sejumlah isu penting yang memerlukan respon kebijakan yang tepat dan terukur. Isu-isu tersebut meliputi:

1. Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga,
2. Pencegahan Kekerasan dan Penguatan Layanan Perlindungan,
3. Penguatan Layanan Kesehatan Reproduksi dan Pengendalian Fertilitas Remaja,
4. Optimalisasi Implementasi NSPK dan Standar KLA,
5. Penguatan Pengarusutamaan Gender dan ARG,
6. Pembaruan Sistem Data dan Digitalisasi Pelayanan, dan
7. Penguatan Kolaborasi Multipihak.

Seluruh isu strategis tersebut berpengaruh secara langsung terhadap capaian kinerja pembangunan pada sektor pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga. Penanganan terhadap berbagai tantangan dan dinamika permasalahan ini sangat krusial dan

memerlukan langkah intervensi yang terencana, terukur, serta berkesinambungan. Oleh karena itu, kondisi objektif tersebut secara utuh dijadikan sebagai dasar dan acuan utama dalam perumusan tujuan serta sasaran Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Melalui penyusunan dokumen perencanaan yang responsif dan berbasis pada permasalahan faktual di lapangan, diharapkan arah kebijakan yang diimplementasikan ke depan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Adapun Tujuan Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

”Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga”

Tujuan ini mendukung arah kebijakan Renstra DP3APPKB dan menjadi respon terhadap kebutuhan pembangunan daerah untuk memperkuat kualitas keluarga, memperluas pemenuhan hak anak, serta menyediakan layanan perlindungan yang cepat, terstandar, dan kolaboratif. Tujuan ini juga selaras dengan mandat nasional terkait Banggakencana, Sistem Perlindungan Anak Terpadu, serta pembangunan Kota Layak Anak.

Sasaran dalam Renja DP3APPKB Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan perangkat daerah serta sebagai respons strategis terhadap isu-isu penting yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Penetapan sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana mampu mendukung pencapaian target-target Renstra secara terukur dan konsisten. DP3APPKB menetapkan tujuan “Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga”, yang kemudian dijabarkan ke dalam sasaran pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan tujuh isu penting. Masing-masing isu memberikan arah kebijakan yang mempengaruhi strategi pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Pertama, isu Penguatan Ketahanan dan Kualitas Keluarga menuntut peningkatan intervensi yang mampu memperbaiki kondisi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hal ini sejalan dengan sasaran peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Capaian iBangga tahun 2025 sebesar 68,4 menunjukkan perlunya intensifikasi program pengasuhan keluarga, peningkatan literasi keluarga, serta

penguatan dukungan psikososial agar target 70,4 pada 2027 dan 72,5 pada 2030 dapat tercapai.

2. Kedua, isu Pencegahan Kekerasan dan Penguatan Layanan Perlindungan menjadi dasar penting dalam penetapan sasaran peningkatan kualitas pemenuhan hak anak. Isu ini mengharuskan penguatan layanan rujukan, peningkatan kompetensi SDM layanan, serta perluasan ruang aman bagi anak. Kondisi ini berkaitan erat dengan sasaran peningkatan Indeks Perlindungan Anak (IPA), yang pada tahun 2025 berada pada angka 72,58. Target peningkatan menjadi 72,6 pada 2027 dan 72,65 pada 2030 menunjukkan komitmen DP3APPKB untuk memastikan seluruh klaster pemenuhan hak anak dari hak sipil hingga perlindungan khusus terlayani dengan lebih optimal.
3. Ketiga, isu penting Penguatan Layanan Kesehatan Reproduksi dan Pengendalian Fertilitas Remaja menegaskan urgensi pengendalian ASFR remaja 15–19 tahun serta penurunan unmet need. Kedua isu ini memengaruhi pencapaian sasaran Renja karena berdampak langsung terhadap kualitas pembangunan keluarga. Perlunya intensifikasi edukasi kespro remaja, peningkatan akses KB ramah remaja, serta penguatan konseling menjadi bagian penting dalam memastikan peningkatan nilai iBangga dan stabilitas indikator keluarga berencana lainnya.
4. Keempat, isu Optimalisasi Implementasi NSPK, dan Standar Kota Layak Anak (KLA) memberikan arah untuk memastikan bahwa pencapaian sasaran dilakukan melalui layanan yang sesuai standar, terukur, dan terintegrasi. Pemenuhan standar KLA di lima klaster juga berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Perlindungan Anak secara langsung.
5. Kelima, isu Penguatan Pengarusutamaan Gender dan Anggaran Responsif Gender (ARG) berperan sebagai landasan transversal dalam pencapaian sasaran. Implementasi PUG dan ARG memastikan bahwa seluruh program yang mendukung capaian indikator, baik terkait keluarga maupun perlindungan anak, dirancang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.
6. Keenam, isu Pembaruan Sistem Data dan Digitalisasi Pelayanan menjadi pendukung kritis bagi pencapaian sasaran, mengingat ketepatan data keluarga, data anak, dan data kasus kekerasan sangat

menentukan efektivitas program yang secara langsung memengaruhi capaian iBangga dan IPA.

7. Ketujuh, isu Penguatan Kolaborasi Multipihak menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi dan perluasan jangkauan layanan. Kolaborasi lintas sektor, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas memperkuat pencapaian sasaran Renja melalui sinergi program yang lebih komprehensif dan berkesinambungan.

Dengan merujuk pada ketujuh isu strategis tersebut, maka sasaran Renja DP3APPKB merupakan sasaran antara (intermediate outcomes) yang diarahkan untuk berkontribusi signifikan terhadap dua indikator utama Renstra, yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA). Sasaran ini mencerminkan komitmen DP3APPKB untuk secara bertahap meningkatkan kualitas keluarga serta memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak melalui program dan kegiatan yang didukung standar layanan, regulasi nasional, data yang akurat, serta kolaborasi multipihak.

Sasaran yang disusun dalam Renja ini menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan tahunan, sehingga capaian target iBangga dan IPA dapat meningkat secara konsisten sesuai dengan rencana yakni iBangga dari 68,4 (2025) menuju 70,4 (2027) dan 72,5 (2030), serta IPA dari 72,58 (2025) menuju 72,6 (2027) dan 72,65 (2030). Dengan demikian, sasaran Renja DP3APPKB tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas pencapaian tujuan pembangunan keluarga dan perlindungan anak di Kota Salatiga.

Adapun tujuan dan sasaran renja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030
1.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	$iBangga = \frac{\text{Skor aktual dari seluruh indikator keluarga}}{\text{Skor maksimum indikator}} \times 100$ Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah angka yang menunjukkan tingkat perkembangan keluarga berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu: 1. Ketentraman (Ketahanan) keluarga – menggambarkan kondisi psikologis, sosial, dan hubungan antaranggota keluarga yang harmonis dan berfungsi. 2. Kemandirian (Kesejahteraan) keluarga – menggambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi. 3. Kebahagiaan (Keberdayaan) keluarga – menggambarkan tingkat kepuasan, rasa bahagia, dan partisipasi anggota keluarga dalam kehidupan sosial dan pembangunan.	Angka	68,4	70,4	72,5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times Indeks_{K_j})$ di mana W_j = bobot klaster ke-j, dan $Indeks_{K_j}$ = indeks klaster ke-j. IPA menyusun lima klaster utama: 1.Hak Sipil dan Kebebasan (Klaster I) 2.Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Klaster II) 3.Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Klaster III) 4.Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Klaster IV) 5.Perlindungan Khusus (Klaster V) Nilai IPA berkisar antara 0 sampai 100, di mana semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah indeks komposit yang mengukur capaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pada suatu wilayah, berdasarkan kerangka kerja Konvensi Hak Anak (Children's Rights Convention).	Indeks	72,58	72,6	72,65

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030
		Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	$IPHA = \frac{\text{Nilai aktual capaian indikator pemenuhan hak anak}}{\text{Nilai maksimum indikator}} \times 100$ IPHA terbagi menjadi 4 klaster utama (berdasarkan prinsip KHA), masing-masing terdiri dari beberapa indikator: 1. Hak Sipil dan Kebebasan, 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Indeks Pemenuhan Hak anak (IPHA) adalah suatu ukuran komposit yang digunakan untuk menilai dan memantau sejauh mana daerah atau institusi memenuhi hak-hak dasar sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA), Undang-undang Perlindungan Anak atau peraturan nasional lainnya. Indeks ini dihitung berdasarkan sejumlah indikator yang mencerminkan pemenuhan hak-hak anak dalam berbagai aspek seperti hak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi. Secara operasional, IPHA menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dan masyarakat telah memastikan terpenuhinya hak anak melalui kebijakan, program, layanan, serta kondisi aktual anak di lapangan.	Angka	71,1	71,12	71,17
		Meningkatnya Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	$IPKA = \frac{\text{Nilai aktual capaian seluruh indikator perlindungan khusus anak}}{\text{Nilai maksimum indikator}} \times 100$ Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah indeks komposit yang mengukur tingkat upaya perlindungan terhadap anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui berbagai indikator, yang mencerminkan aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan, berdasarkan jenis perlindungan khusus sesuai peraturan perundang-undangan. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan alat ukur	Angka	80,35	80,37	80,41

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030
				kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana daerah memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang berada dalam situasi rentan, seperti anak korban kekerasan, anak dengan disabilitas, anak berhadapan dengan hukum, dan kelompok lainnya yang memerlukan perlakuan khusus Ruang Lingkup Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, AMPK mencakup setidaknya 15 kategori anak, antara lain: 1. Anak korban kekerasan fisik, psikis, dan seksual 2. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) 3. Anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual 4. Anak yang menjadi korban perdagangan orang 5. Anak dalam situasi darurat (konflik, bencana, pengungsi) 6. Anak penyandang disabilitas 7. Anak yang hidup dengan/terinfeksi HIV/AIDS 8. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi 9. Anak korban narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) 10. Anak korban pornografi 11. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan 12. Anak korban stigmatisasi dari pelabelan terkait latar belakang orang tuanya 13. Anak dengan perilaku sosial menyimpang 14. Anak yang menjadi korban radikalisme dan terorisme 15. Anak dalam konflik sosial atau etnis				

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030
		Terkendalinya Jumlah Penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_{15-19} = \frac{\text{Jumlah kelahiran hidup dari perempuan usia 15-19 tahun}}{\text{Jumlah total perempuan usia 15-19 tahun}} \times 1.000$ ASFR 15–19 adalah jumlah kelahiran hidup dari perempuan berusia 15–19 tahun per 1.000 perempuan dalam kelompok umur yang sama pada periode tertentu (biasanya satu tahun kalender).Secara operasional, indikator ini menggambarkan tingkat fertilitas atau intensitas kelahiran di kalangan remaja perempuan, yang digunakan untuk menilai kondisi pernikahan dini, kehamilan remaja, serta risiko kesehatan reproduksi pada kelompok usia tersebut.	per 100.000 Kelahiran Hidup	0,63	0,55	0,4

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Capaian 2025	Target 2027	Target 2030
		Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	$IPBK = \frac{\text{Skor aktual seluruh indikator pembangunan berwawasan kependudukan}}{\text{Skor maksimum indikator}} \times 100$ IPBK adalah indeks komposit yang mengukur sejauh mana pembangunan suatu wilayah telah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-kependudukan (jumlah, kualitas, persebaran dan mobilitas penduduk) secara sistematis dan berkelanjutan. Secara operasional, IPBK menggambarkan tingkat integrasi, implementasi, dan hasil pembangunan yang memperhatikan dinamika kependudukan, seperti kuantitas, kualitas, persebaran, dan mobilitas penduduk, dalam kebijakan dan program pembangunan daerah maupun nasional. Menurut pedoman BKKBN, IPBK diukur melalui lima dimensi utama, yaitu: 1. Kualitas Penduduk – mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. 2. Persebaran dan Mobilitas Penduduk – mencerminkan pemerataan dan keterkendalian arus migrasi. 3. Pertumbuhan Penduduk – mencerminkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk. 4. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera – menggambarkan keberhasilan program KB dan peningkatan kualitas keluarga. 5. Pembangunan yang Responsif terhadap Kependudukan – menunjukkan sejauh mana aspek kependudukan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, Renstra, Renja).	Angka	76,8	84,5	88,6

Selain menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan tahunan, DP3APPKB juga menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai ukuran utama dalam menilai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Penetapan IKK ini merupakan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengharuskan setiap perangkat daerah menentukan indikator kinerja yang mencerminkan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan.

IKK difungsikan sebagai indikator strategis yang berperan untuk memastikan keterukuran, akuntabilitas, dan konsistensi kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta keluarga berencana. IKK juga menjadi tolok ukur penting dalam menilai kualitas layanan, efektivitas implementasi kebijakan, serta derajat keberhasilan upaya perlindungan perempuan dan anak serta penguatan ketahanan keluarga di daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, DP3APPKB menetapkan enam Indikator Kinerja Kunci sebagai berikut:

1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD, yang mengukur sejauh mana pendekatan Anggaran Responsif Gender telah diterapkan oleh pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kapasitas perencanaan perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender, tetapi juga menggambarkan komitmen pemerintah daerah terhadap implementasi PUG dan PPRG. Target peningkatan dari 9,31% pada tahun 2027 menjadi 9,38% pada tahun 2030 menunjukkan penguatan kelembagaan PUG secara berkelanjutan.
2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait, yang menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan penanganan kasus kekerasan anak. Target 100% pada tahun 2027 dan 2030 menegaskan komitmen bahwa seluruh kasus yang dilaporkan harus mendapatkan penanganan komprehensif, lintas sektor, dan sesuai standar layanan, terutama terkait kekerasan berbasis gender, TPPO, dan perlindungan khusus anak.

3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan), yang menggambarkan tingkat kerentanan perempuan terhadap kekerasan sekaligus efektivitas sistem perlindungan perempuan. Target penurunan dari 68,596 pada 2027 menjadi 67,576 pada 2030 menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya mengurangi risiko kekerasan melalui penguatan pencegahan, edukasi, penegakan hukum, dan akses layanan pemulihan.
4. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) yang mencerminkan keberhasilan layanan keluarga berencana dalam meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi modern di kalangan WUS (Wanita Usia Subur). Peningkatan mCPR dari 68,36% pada 2027 menjadi 70,44% pada 2030 diharapkan dapat menurunkan risiko kehamilan tidak diinginkan, meningkatkan kesehatan reproduksi, serta mengurangi fertilitas total.
5. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Target 1,74 pada 2027 dan 1,82 pada 2030 diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta memastikan keseimbangan antara dinamika kependudukan dan kapasitas pembangunan di daerah. Pengendalian fertilitas ini berhubungan erat dengan layanan KB, kesejahteraan keluarga, dan edukasi kespro remaja.
6. Persentase unmet need atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, yang mengukur kesenjangan antara keinginan ber-KB dengan akses atau penggunaan metode kontrasepsi. Penurunan unmet need dari 6,89% pada 2027 menjadi 5,02% pada 2030 menunjukkan bahwa pelayanan KB semakin menjangkau kelompok sasaran, khususnya WUS usia muda, pasangan muda, dan kelompok rentan, serta menandakan peningkatan kualitas layanan, aksesibilitas, dan literasi kespro di masyarakat.

Secara keseluruhan, keenam Indikator Kinerja Kunci tersebut menjadi landasan evaluatif bagi DP3APPKB untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penetapan target hingga tahun 2030 menggambarkan arah pembangunan jangka menengah–panjang yang konsisten dengan sasaran Renstra dan prioritas pembangunan daerah. Adapun Indikator Kinerja kunci DP3APPKB adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kinerja Kunci DP3APPKB Kota Salatiga

No	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Target 2027	Target 2030	Ket
1.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	Persentase ARG = $\frac{\text{Nilai Belanja Langsung yang Responsif Gender}}{\text{Total Belanja Langsung APBD}} \times 100\%$ Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD adalah proporsi anggaran yang telah menerapkan pendekatan Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap total belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran tertentu. Nilai yang tinggi menunjukkan semakin besar porsi anggaran yang telah menerapkan perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program daerah. Nilai yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan komitmen perangkat daerah dalam pelaksanaan PPRG.	%	9,31	9,38	
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani = $\frac{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait}}{\text{Jumlah total anak korban kekerasan yang dilaporkan}} \times 100\%$	%	100	100	

No	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Target 2027	Target 2030	Ket
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota adalah proporsi anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh lembaga/instansi berwenang di tingkat kota, dibandingkan dengan total anak korban kekerasan yang dilaporkan pada periode tertentu. Kekerasan terhadap perempuan: Segala bentuk perbuatan yang berakibat atau mungkin berakibat pada penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran, termasuk ancaman atau pemaksaan, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi (UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO). Penduduk perempuan: jumlah seluruh penduduk berjenis kelamin perempuan di suatu wilayah pada pertengahan tahun (mid-year population)				
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	(Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO, dalam 1 tahun ÷ Jumlah penduduk perempuan) × 100.000 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), adalah jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan (termasuk korban TPPO) per 100.000 penduduk perempuan. Indikator ini menggambarkan tingkat kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan di suatu wilayah serta kemampuan sistem perlindungan perempuan dalam pencegahan dan penanganan kasus. an dalam satu tahun.	%	68,596	67,576	
4.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive	$mCPR = \frac{\text{Jumlah WUS kawin yang menggunakan kontrasepsi modern}}{\text{Jumlah seluruh WUS kawin}} \times 100\%$	%	68,36	70,44	

No	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Target 2027	Target 2030	Ket
	Prevalance Rate/mCPR)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) adalah persentase perempuan usia 15–49 tahun yang saat pengumpulan data menggunakan salah satu metode kontrasepsi modern terhadap seluruh perempuan usia 15–49 tahun yang berstatus kawin atau pernah kawin. WUS (Wanita Usia Subur): Perempuan berusia 15–49 tahun yang secara biologis dapat melahirkan. WUS kawin: Perempuan usia subur yang saat survei sedang menikah atau pernah menikah. Tidak menggunakan kontrasepsi: Perempuan yang tidak memakai metode kontrasepsi modern maupun tradisional. Ingin menunda kelahiran: Perempuan yang ingin menunda kelahiran anak berikutnya selama ≥2 tahun. Ingin menghentikan kelahiran: Perempuan yang tidak ingin memiliki anak lagi.				
5.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	$TFR = 5 \times \sum_{i=15}^{49} ASFR_i$ Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15–49 tahun) apabila selama masa tersebut ia mengalami pola fertilitas yang sama dengan pola fertilitas pada tahun tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat fertilitas (kesuburan) perempuan usia subur di suatu wilayah dan waktu tertentu. TFR merupakan ukuran penting dalam analisis kependudukan karena menunjukkan kecenderungan jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan.	Rata-rata Anak per Wanita	1,74	1,82	
6.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\text{Unmet Need (\%)} = \frac{\text{PUS yang ingin menunda atau menghentikan kelahiran tetapi tidak menggunakan kontrasepsi}}{\text{Jumlah seluruh PUS}} \times 100$	%	6,89	5,02	

No	Indikator	Definisi Operasional/Rumus	Satuan	Target 2027	Target 2030	Ket
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) adalah persentase perempuan usia 15–49 tahun yang berstatus kawin atau pernah kawin, yang ingin menunda atau menghentikan kelahiran anak tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apa pun (modern maupun tradisional). Indikator ini menggambarkan tingkat kesenjangan antara keinginan ber-KB dengan pemakaian kontrasepsi, serta menjadi ukuran penting dalam menilai aksesibilitas dan kualitas pelayanan keluarga berencana. Perempuan dikategorikan unmet need jika: 1. Ingin menunda kehamilan (unmet need for spacing) tetapi tidak menggunakan kontrasepsi; 2. Ingin menghentikan kehamilan (unmet need for limiting) tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Tidak termasuk: • Perempuan yang sedang hamil atau tidak ingin punya anak tetapi kehamilan tersebut tidak direncanakan (termasuk unmet need saat ini) Nilai unmet need tinggi → menunjukkan banyak perempuan yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (akses, pengetahuan, atau ketersediaan layanan kurang. Nilai unmetneed→ menunjukkan pelayanan KB lebih merata dan efek				

Dalam rangka memastikan keselarasan antara perencanaan perangkat daerah dengan arah pembangunan daerah secara keseluruhan, DP3APPKB menetapkan program dan kegiatan yang secara langsung mendukung Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun Berkenaan. Penetapan dukungan ini merupakan bentuk integrasi peran perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada level kota, serta memastikan bahwa intervensi yang dilakukan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan fokus pembangunan daerah.

Pada Prioritas Kota PROGRAM SEHATI: Salatiga Sehat Terlindungi, DP3APPKB memberikan dukungan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan keluarga, penurunan risiko stunting, serta penguatan ketahanan keluarga. Dukungan tersebut diwujudkan melalui tiga program utama pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu:

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap penurunan keluarga berisiko stunting melalui penguatan layanan keluarga berencana, penyuluhan, serta peningkatan peran keluarga dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Melalui kegiatan ini, DP3APPKB memberikan bantuan stimulant kepada balita, calon pengantin (catin), serta ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronis (KEK). Bantuan diberikan secara langsung maupun melalui penguatan DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) di Kampung Keluarga Berkualitas. Intervensi ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan, namun juga mendorong peran masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk aktif berpartisipasi dalam upaya percepatan penurunan stunting.

3. Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk dukungan strategis karena berfokus pada pengelolaan dan optimalisasi DASHAT sebagai model pemberdayaan masyarakat berbasis pangan lokal untuk mendukung pemenuhan gizi keluarga, khususnya balita dan ibu hamil. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Kampung

Keluarga Berkualitas sebagai pusat pembelajaran keluarga dan intervensi penurunan stunting yang berkelanjutan.

Melalui ketiga program tersebut, DP3APPKB berkomitmen memperkuat kontribusinya terhadap pencapaian Prioritas Kota Salatiga Sehat Terlindungi, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas layanan keluarga berencana, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Adapun dukungan program dan kegiatan daerah terhadap prioritas kota terdapat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Dukungan Program dan Kegiatan Daerah terhadap Prioritas dan Kota

No	Prioritas Kota	Program	Aktivitas
1	PROGRAM SEHATI: Salatiga Sehat Terlindungi	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Penurunan Keluarga Beresiko Stunting: DP3PPKB memberikan bantuan untuk balita, catin dan ibu hamil yang Kurang Energi Kronis (KEK) berupa stimulant secara langsung maupun melalui DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting) serta terlaksananya Fasilitas Pengelolaan DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas

3.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Perumusan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor strategis yang berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya di bidang Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Keseluruhan program dan kegiatan yang dipilih merupakan hasil analisis mendalam terhadap kerangka regulasi nasional, capaian kinerja Renstra, kondisi empiris masyarakat, serta tuntutan pembangunan tematik seperti stunting, kemiskinan ekstrem, kota layak anak, pengarusutamaan gender, dan inklusi keuangan. Adapun faktor-faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

3.4.1.1. Pencapaian Visi, Misi , Sasaran dan Tujuan Pembangunan Daerah

Seluruh program dan kegiatan diprioritaskan untuk mendukung pencapaian visi, misi, sasaran, dan tujuan pembangunan daerah, khususnya sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD. Kegiatan seperti pendampingan keluarga berisiko stunting, penguatan kelompok BKB/BKR/BKL, pemanfaatan data keluarga, hingga pembinaan IMP dan layanan KB dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas keluarga, peningkatan derajat kesehatan reproduksi, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Kegiatan Fasilitasi Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) serta pendampingan keluarga berisiko stunting dipilih karena berkontribusi langsung terhadap indikator kinerja pembangunan daerah seperti penurunan prevalensi stunting, peningkatan ketahanan keluarga, dan penguatan layanan dasar bagi ibu-anak.

3.4.1.2. Pencapaian terhadap Pencapaian SDGs

Program dan kegiatan juga mempertimbangkan kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama:

- a. SDG 1: Tanpa Kemiskinan – melalui pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKA) dan pendampingan keluarga miskin berisiko stunting.
- b. SDG 2: Tanpa Kelaparan – melalui program DASHAT yang mendukung pemenuhan pangan bergizi keluarga.
- c. SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera – melalui pelayanan KB, promosi kesehatan reproduksi, konseling pasca persalinan, dan pengendalian ASFR.
- d. SDG 4 & 5: Pendidikan Berkualitas dan Kesetaraan Gender– melalui pelatihan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan serta penerapan ARG dalam penganggaran.
- e. SDG 10 & 11: Pengurangan Ketimpangan dan Kota Berkelanjutan – melalui program Kota Layak Anak dan layanan responsif terhadap anak.

Dengan demikian, kegiatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi bagian dari kontribusi strategis daerah terhadap agenda pembangunan global.

3.4.1.3. Pengentasan Kemiskinan

Pertimbangan penting lainnya adalah kontribusi program terhadap penanganan kemiskinan ekstrem. Data menunjukkan bahwa keluarga miskin umumnya memiliki risiko lebih tinggi terkait stunting, KTD, putus sekolah, hingga kekerasan. Oleh karena itu kegiatan seperti: Pendampingan keluarga berisiko stunting, Pembentukan kelompok UPPKA, Pemberdayaan ekonomi keluarga, Penguatan layanan KB dan kesehatan reproduksi, DASHAT, dipilih untuk memastikan keluarga miskin mendapatkan dukungan secara langsung. Kegiatan-kegiatan ini memperkuat kemandirian ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan status kesehatan dan gizi, yang bermuara pada pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan.

3.4.1.4. Penurunan Stunting

Perumusan program dan kegiatan penurunan stunting pada DP3APPKB mempertimbangkan karakteristik keluarga berisiko stunting yang dipengaruhi faktor kependudukan dan keluarga, seperti pernikahan usia anak, jarak kelahiran terlalu dekat, kehamilan tidak direncanakan, rendahnya cakupan KB pascapersalinan/MKJP, serta pola asuh pada periode 1.000 HPK. DP3APPKB melaksanakan pendampingan keluarga berisiko stunting secara berkala melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK) dengan penguatan KIE kesehatan reproduksi, pengasuhan, dan rujukan layanan. Intervensi sensitif stunting diperkuat melalui Program GENTING dengan pemenuhan kebutuhan gizi keluarga berisiko stunting melalui Dapur DASHAT, dengan menu makanan bergizi seimbang yang disusun oleh Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Selain itu, kolaborasi pembiayaan pangan bergizi dilakukan melalui dukungan CSR dari Pawarsa (Persatuan Warga Salatiga) sebagai donatur, serta kemitraan dengan Universitas Kristen Satya Wacana sebagai orang tua asuh anak stunting. Sinergi lintas

sektor ini menjadi pertimbangan utama dalam perumusan program agar intervensi keluarga berisiko stunting lebih terarah, berkelanjutan, dan berdampak nyata.

3.4.1.5. Pencapaian NSPK

Pertimbangan yang sangat penting adalah pemenuhan regulasi nasional, termasuk NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria), Sub-Urusan KB, serta standar Kota Layak Anak. Kegiatan seperti: pemutakhiran dan pemanfaatan data keluarga, pelayanan KB bergerak, peningkatan MKJP, pendampingan keluarga berisiko stunting, pelatihan teknis pengelola BKB/BKR/BKL, disusun untuk memastikan standar minimal pelayanan dapat dipenuhi, terutama pelayanan dasar KB, fasilitasi data kependudukan, serta pemenuhan hak anak. Tanpa program ini, daerah berpotensi tidak memenuhi SPM yang menjadi kewajiban konstitusional pemerintah daerah.

3.4.1.6. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kegiatan pembangunan keluarga dan pemberdayaan ekonomi melalui UPPKA serta kelompok BKB/BKR/BKL dilaksanakan sebagai upaya strategis untuk menggali potensi ekonomi lokal. Kegiatan seperti pembentukan kelompok UPPKA, pelatihan pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan sarana kelompok kegiatan didesain untuk meningkatkan kapasitas usaha mikro keluarga sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keluarga. Program ini relevan dalam konteks inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas di tingkat kelurahan.

3.4.1.7. Penguatan Kota Layak Anak dan Responsif Anak

Program dan kegiatan dalam kebijakan tematik Perlindungan Anak dan Kota Layak Anak dipilih untuk menguatkan sistem perlindungan khusus anak, pemenuhan hak, serta mendorong lingkungan yang aman bagi anak. Fasilitasi DASHAT, pendampingan keluarga, dan pemantauan data keluarga berisiko stunting merupakan bagian dari kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dalam KLA. Dengan demikian, program mendukung peningkatan

kategori KLA melalui penguatan lingkungan ramah anak dan pencegahan kekerasan.

3.4.1.8. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Penguatan ARG

Kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan serta pembentukan kelompok ekonomi perempuan dipilih berbasis pertimbangan PUG dan kebutuhan untuk memastikan kebijakan daerah responsif gender. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas perempuan dalam mengambil keputusan, tetapi juga memastikan perempuan memperoleh akses yang setara terhadap pembangunan ekonomi dan layanan pemerintah.

3.4.1.9. Pembaruan Sistem Data dan Digitalisasi Pelayanan

Beberapa program dan kegiatan diarahkan untuk memperkuat digitalisasi pelayanan dan pembaruan sistem data, misalnya: pemutakhiran data keluarga, pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan, penyediaan data dan informasi keluarga, pemantauan data keluarga berisiko stunting. Kegiatan ini menjadi pertimbangan penting mengingat kualitas data menentukan akurasi intervensi pemerintah, identifikasi sasaran stunting, perencanaan pelayanan KB, dan monitoring efektivitas program keluarga.

3.4.1.10. Penguatan Kolaborasi Multipihak

Kegiatan pendampingan keluarga, pembinaan IMP/PLKB, dan pelaksanaan kegiatan kelompok BKB/BKR/BKL memperkuat kemitraan lintas sektor antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, sekolah, TP PKK, kader, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi dibutuhkan karena isu stunting, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan tidak dapat diselesaikan satu sektor saja. Kolaborasi multipihak menjadi dasar penting dalam pemilihan kegiatan yang bersifat integratif, partisipatif, dan lintas program.

Adapun dukungan Program dan Kegiatan ada pada tabel sebagaimana berikut:

Tabel 3.6
Dukungan Program dan Kegiatan

No	Jenis Kebijakan	Program	Aktivitas
1	Perlindungan Anak	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana , 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, 2.14.03.2.04.0005 Sub Keg Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Layananan-Fasilitas pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
		2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera , 2.14.04.2.02 Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 2.14.04.2.02.0006 Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Layananan-Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)
2	Responsif Anak	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana , 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, 2.14.03.2.04.0005 Sub Keg Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Layananan-Fasilitas pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
		2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera , 2.14.04.2.02 Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 2.14.04.2.02.0006 Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Layananan-Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)
3	Stunting	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana , 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, 2.14.03.2.04.0005 Sub Keg	Layananan-Fasilitas pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas

No	Jenis Kebijakan	Program	Aktivitas
		Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
		2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, 2.14.04.2.02 Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 2.14.04.2.02.0006 Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (termasuk ramaja calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Layanan-Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)
		2.14.02 Program Pengendalian Penduduk, 2.14.02.2.02 Keg Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota, 2.14.02.2.2.02.0010 Sub Keg Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Layanan-Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
		2.14.02 Program Pengendalian Penduduk, 2.14.02.2.02 Keg Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota, 2.14.02.2.2.02.0011 Sub Keg Penyediaan dan Informasi Keluarga	Layanan- Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
		2.14.02 Program Pengendalian Penduduk, 2.14.02.2.02 Keg Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota, 2.14.02.2.2.02.0012 Sub Keg Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Aktivitas- Melaksanakan pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
		2.14.02 Program Pengendalian Penduduk, 2.14.02.2.02 Keg Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota, 2.14.02.2.2.02.0013 Sub Keg Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Aktivitas-Melaksanakan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB
		2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana, 2.14.03.2.02 Keg Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB), 2.14.03.2.03.0005 Sub Keg Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Aktivitas-Melaksanakan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB
		2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana, 2.14.03.2.03 Keg Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota, 2.14.03.2.03.0003 Sub Keg Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Layanan-Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

No	Jenis Kebijakan	Program	Aktivitas
		2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana , 2.14.03.2.03 Keg Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota, 2.14.03.2.03.0006 Sub Keg Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Layanan-Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB
		2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana , 2.14.03.2.03 Keg Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota, 2.14.03.2.03.0008 Sub Keg Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Layanan-Melaksanakan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
		2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana , 2.14.03.2.03 Keg Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota, 2.14.03.2.03.0011 Sub Keg Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Layanan-dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
		2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana , 2.14.03.2.03 Keg Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota, 2.14.03.2.03.0016 Sub Keg Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Layanan-Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan
		2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera , 2.14.04.2.01 Keg Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 2.14.04.2.01.0018 sub Keg Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Layanan-Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
		2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera , 2.14.04.2.01 Keg Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 2.14.04.2.01.0021 Sub Keg Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Aktivitas--Orientasi dan pelatihan teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
		2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera , 2.14.04.2.01 Keg Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Layanan-Penyediaan biaya operasional bagi kader pengelola dan pelaksana

No	Jenis Kebijakan	Program	Aktivitas
		Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 2.14.04.2.01.0024 sub Keg Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	(kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))
		2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, 2.14.04.2.01 Keg Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 2.14.04.2.01.0028 Sub Keg Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Aktivitas- Membentuk kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
		2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, 2.14.04.2.02 Keg Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 2.14.04.2.02.0005 Sub Keg Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Aktivitas - Memantau Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)
		2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	layanan-Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)
4	Kemiskinan Ekstrim (AstaCita)	2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, 2.14.04.2.02 Keg Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 2.14.04.2.02.0006 Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (termasuk ramaja calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Layanan-Pendampingan Keluarga Verisiko Stunting (Termasuk remja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)

No	Jenis Kebijakan	Program	Aktivitas
5	Kota Layak Anak	2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Berencana , 2.14.03.2.04 Keg Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, 2.14.03.2.04.0005 Sub Keg Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Layanan-Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas
		2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera , 2.14.04.2.02 Keg Pelaksanaan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 2.14.04.2.02.0006 Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (termasuk remaja calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Layanan-Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)
6	Inklusi Keuangan	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan , 2.08.02.2.02 Keg Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi, 2.08.02.2.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pemberdayaan perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Aktivitas-Peningkatan kapasitas SDM Pemberdayaan Perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi
		2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Aktivitas- Membentuk kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

3.4.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub Kegiatan

3.4.2.1. Jumlah program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan

Analisis kebutuhan program dan kegiatan DP3APPKB Kota Salatiga dilakukan berdasarkan target kinerja, indikator capaian, serta besaran kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan layanan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Secara keseluruhan jumlah program sebanyak 10 program, Kegiatan 24 dan sub kegiatan sejumlah 50, sedangkan kebutuhan pembiayaan diarahkan untuk memastikan tercapainya standar layanan minimal, peningkatan kualitas kelembagaan, serta penguatan sistem layanan berbasis masyarakat dan berbasis lembaga.

3.4.2.2. Sifat penyebaran lokasi program, jumlah kegiatan dan sub kegiatan

Pelaksanaan program dan kegiatan DP3APPKB pada RKPD Tahun 2027 memiliki sifat penyebaran lokasi yang merata di seluruh wilayah kota, mencakup seluruh kecamatan serta 23 kelurahan sebagai lokus pelaksanaan layanan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan berbasis wilayah dan komunitas (Kampung Keluarga Berkualitas, layanan KB, pendampingan keluarga berisiko stunting, serta perlindungan perempuan dan anak) serta pendekatan terpusat di tingkat perangkat daerah untuk fungsi perencanaan, pengelolaan data, koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta administrasi penunjang.

Secara kuantitatif, RKPD Tahun 2027 DP3APPKB memuat 10 (sepuluh) program yang dijabarkan ke dalam 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 50 (lima puluh) subkegiatan. Rangkaian kegiatan dan subkegiatan tersebut mencakup penguatan tata kelola perangkat daerah, penguatan kelembagaan dan layanan urusan PUG, perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pembangunan keluarga, serta penguatan basis data gender dan anak.

Pola sebaran lokasi kegiatan diarahkan untuk menjangkau sasaran prioritas di tingkat kecamatan dan kelurahan, khususnya keluarga berisiko (stunting, perkawinan usia anak, unmet need KB), kelompok rentan (perempuan dan anak korban kekerasan), serta penguatan kelembagaan lokal (Forum Anak, Kampung KB, kader BKB/BKR/BKL). Sementara itu, kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah dilaksanakan secara terpusat di perangkat daerah guna menjamin efektivitas tata kelola, akuntabilitas kinerja, kualitas layanan publik, dan keberlanjutan program.

3.4.2.3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif

Total kebutuhan pendanaan/pagu indikatif DP3APPKB dalam RKPD Tahun 2027 berdasarkan rincian program, kegiatan, dan subkegiatan adalah sebesar **Rp7.343.522.198**. Pendanaan tersebut direncanakan bersumber dari **APBD Kota** sebagai sumber pendanaan utama untuk mendukung pelaksanaan 10 (sepuluh) program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta program penunjang urusan pemerintahan daerah.

Penggunaan pagu indikatif diarahkan untuk membiayai kegiatan prioritas yang mencakup: (i) penguatan tata kelola perangkat daerah (perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, BMD, layanan perkantoran, dan pemeliharaan sarpras); (ii) penguatan kelembagaan dan layanan urusan PUG, perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak; (iii) intervensi langsung kepada keluarga melalui program pengendalian penduduk, pembinaan KB (termasuk peningkatan MKJP dan KB pria), pembangunan keluarga dan Kampung Keluarga Berkualitas; serta (iv) penguatan basis data gender dan anak serta data mikro keluarga sebagai dasar perencanaan berbasis bukti.

Selain APBD, pelaksanaan beberapa kegiatan strategis juga **didukung oleh sumber pendanaan non-APBD melalui kemitraan/CSR dan kolaborasi lintas sektor**, khususnya pada intervensi sensitif stunting dan pemberdayaan keluarga

(misalnya dukungan pangan bergizi, pendampingan keluarga berisiko stunting, dan penguatan peran komunitas). Pendanaan non-APBD tersebut bersifat komplementer untuk memperluas jangkauan manfaat program, tanpa menggantikan peran APBD sebagai sumber pendanaan utama.

3.4.3. Perbandingan Renstra dan RKPD 2027

Secara umum, pagu indikatif DP3APPKB dalam RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran tahunan dari kebutuhan pendanaan yang direncanakan dalam Renstra Perangkat Daerah. Namun demikian, terjadi penyesuaian (rasionalisasi) pagu pada beberapa program dan subkegiatan sebagai dampak kebijakan efisiensi belanja daerah, penajaman prioritas pembangunan, serta fokus pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU), khususnya pengendalian penduduk dan KB, percepatan penurunan stunting, pembangunan keluarga, serta perlindungan perempuan dan anak.

1) Perbandingan Pagu Indikatif (Gambaran Umum)

Total pagu RKPD 2027 sebesar Rp 8.290.418.405 relatif lebih rendah/terkendali dibanding pagu indikatif Renstra tahunan Rp10.903.746.833, seiring kebijakan efisiensi belanja operasional dan penajaman prioritas.

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 2) Program PUG dan Pemberdayaan Perempuan RENSTRA: Rp 230.597.607 , RKPD 2027: Rp 105.000.000. Penurunan hampir 55%. Program Perlindungan Perempuan RENSTRA: Rp 360.875.284, RKPD 2027: Rp 70.000.000. Penurunan sangat signifikan (lebih dari 75%). Program Peningkatan Kualitas Keluarga RENSTRA: Rp 573.103.069, RKPD 2027: Rp 150.000.000. Penyesuaian besar akibat kebijakan efisiensi. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) RENSTRA: Rp 262.012.170, RKPD 2027: Rp 102.223.400. Program Perlindungan Khusus Anak RENSTRA: Rp 341.670.110, RKPD 2027: Rp 72.776.600. Penurunan pagu ini menunjukkan adanya kebijakan rasionalisasi

dan penyesuaian kemampuan keuangan daerah pada tahun berjalan.

3) Perbedaan Jumlah dan Jenis Sub Kegiatan

Selain penurunan pagu, terdapat penyederhanaan jumlah sub kegiatan dalam RKPD. Pada Program Perlindungan Perempuan dalam RENSTRA terdapat banyak sub kegiatan layanan komprehensif seperti:

layanan kesehatan tidak dijamin BPJS, layanan medikolegal, layanan rumah perlindungan, layanan gelar kasus, layanan pendampingan tenaga ahli, layanan pendampingan korban namun dalam RKPD 2027, sebagian besar layanan tersebut digabung dalam satu sub kegiatan utama (Layanan Pengaduan/Penjangkauan) Tidak dirinci secara terpisah, difokuskan pada kegiatan prioritas dengan output terukur. Hal serupa terjadi pada Program Perlindungan Khusus Anak, di mana RENSTRA memuat 8 jenis layanan spesifik RKPD hanya memuat 1 jenis layanan utama dan 1 kegiatan penguatan lembaga, artinya terjadi penggabungan sub kegiatan.

4) Perubahan Indikator dan Volume.

Beberapa indikator mengalami penyesuaian Pada RENSTRA, target layanan korban perempuan: 15 orang, pada RKPD meningkat menjadi 25 orang namun dengan pagu lebih kecil, artinya pendekatan kegiatan menjadi lebih efisien dan terfokus. Pada Perlindungan Khusus Anak RENSTRA 10 orang per jenis layanan, RKPD 20 orang dalam satu layanan terpadu. Ini menunjukkan pendekatan integratif dibandingkan pendekatan sektoral terpisah.

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEREBCANA

5) Perbedaan pada Pagu Indikatif Program

Secara umum terjadi penurunan pagu indikatif pada seluruh program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain:

Program Pengendalian Penduduk RENSTRA: Rp 492.771.630, RKPD 2027 sebesar Rp 146.400.000. Terjadi penurunan signifikan akibat rasionalisasi belanja dan fokus pada kegiatan prioritas. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

RENSTRA: Rp 1.749.834.730. RKPD 2027: Rp 124.600.000. Penyesuaian sangat signifikan, terutama pada kegiatan pelayanan KB dan pergerakan kader. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) RENSTRA: Rp 1.137.741.840, RKPD 2027 sebesar Rp 79.000.000. Penyesuaian akibat kebijakan efisiensi dan penguatan pendekatan minimal pelayanan. Penurunan pagu tersebut disebabkan oleh kebijakan efisiensi belanja daerah, penyesuaian kemampuan fiskal, serta penajaman prioritas pembangunan tahun 2027. Program prioritas seperti Pengendalian Penduduk, Pembinaan KB, Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, serta Perlindungan Perempuan dan Anak tetap menjadi fokus pembiayaan RKPD 2027 karena berkorelasi langsung dengan target kinerja daerah (MUKP, MKJP, mCPR, stunting, layanan korban kekerasan, KLA/PHA).

6) Perbedaan Jumlah dan Jenis Kegiatan/Sub Kegiatan

Selain pagu, terdapat penyederhanaan jumlah kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD Tahun 2027. Program Pengendalian Penduduk dalam RENSTRA terdapat beberapa sub kegiatan seperti: Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal, Penyusunan GDPK 5 Pilar,

Advokasi Kajian Dampak Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan Sistem Informasi Keluarga, Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga. Pada RKPD 2027, sebagian kegiatan tidak dimunculkan secara terpisah, digabung dalam bentuk kegiatan advokasi dan penyusunan PJPK, difokuskan pada integrasi lintas sektor Kampung KB dan monitoring DASHAT. Dengan demikian terjadi pengurangan jumlah sub kegiatan serta perubahan nomenklatur. Pada Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) di RENSTRA terdapat komponen besar: Pendayagunaan PKB/PLKB, Penggerakan IMP (255 orang), Peningkatan MKJP (600 orang), Pembinaan pelayanan KB, Dukungan komplikasi MKJP, Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan (40 orang), sedangkan pada RKPD 2027 tidak seluruh komponen pendayagunaan tenaga dan pergerakan kader dimunculkan, Volume MKJP dan peningkatan kompetensi diturunkan. Kegiatan difokuskan pada advokasi KIE, MKJP

terbatas, KB pria dan pelayanan dasar. Terjadi pengurangan volume sasaran dan penyederhanaan struktur kegiatan. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dalam RENSTRA terdapat Pengadaan sarana kelompok kegiatan (10 unit), Pendampingan keluarga berisiko stunting, Pemantauan data keluarga berisiko stunting, dukungan operasional organisasi kemasyarakatan, Alokasi signifikan untuk pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA. Pada RKPD 2027 Pengadaan sarana tidak dimunculkan, Pendampingan keluarga berisiko stunting tidak dirinci terpisah, Kegiatan difokuskan pada promosi, sosialisasi, dan pelatihan terbatas. Pagu kegiatan organisasi kemasyarakatan diturunkan signifikan.

PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH KOTA

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen RKPD Tahun 2027 dibandingkan dengan RENSTRA Perangkat Daerah, pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat beberapa perbedaan yang meliputi pagu indikatif, jumlah dan struktur sub kegiatan, volume target, serta kombinasi perubahan anggaran dan target kinerja.

7) Kesesuaian Jenis Program

Secara umum, jenis program tetap sama antara RENSTRA dan RKPD Tahun 2027, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator program juga relatif konsisten, yaitu Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan (100%), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

8) Perbedaan Pagu Indikatif Program dan Kegiatan

Secara total, pagu indikatif pada beberapa kegiatan mengalami kenaikan maupun penurunan signifikan dibandingkan RENSTRA. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah RENSTRA: Rp 5.489.010.400, RKPD 2027 sebesar Rp 5.494.986.000 relatif stabil, hanya terjadi penyesuaian teknis pada komponen gaji dan administrasi ASN. Administrasi Barang Milik Daerah RENSTRA Rp 11.000.000 RKPD 2027 sebesar Rp 60.000.000, terjadi peningkatan signifikan, menunjukkan penguatan pengamanan aset daerah. Administrasi Umum Perangkat Daerah RENSTRA Rp

86.500.000, RKPD 2027 sebesar Rp 157.645.000, peningkatan pagu hampir dua kali lipat, terutama pada bahan logistik kantor, rapat koordinasi dan konsultasi, fasilitasi kunjungan tamu. Pengadaan Barang Milik Daerah RENSTRA Rp 12.000.000, RKPD 2027 Rp 60.790.000 peningkatan signifikan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung. Penyediaan Jasa Penunjang RENSTRA Rp 63.000.000 RKPD 2027 Rp 240.869.226 terdapat kenaikan sangat signifikan karena adanya sub kegiatan baru yaitu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Pemeliharaan Barang Milik Daerah RENSTRA Rp 39.000.000 RKPD 2027 Rp 444.232.400 terdapat kenaikan sangat besar terutama pada Pemeliharaan kendaraan dinas, Rehabilitasi gedung kantor, Pemeliharaan sarana prasarana.

9) Perbedaan Jumlah dan Struktur Sub Kegiatan

Beberapa perbedaan yang ditemukan antara lain Penambahan Sub Kegiatan. Dalam RKPD muncul sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tidak dirinci dalam RENSTRA sebagai sub kegiatan tersendiri. Volume pemeliharaan sarana prasarana meningkat dari 17 unit menjadi 47 unit.

10) Perubahan Volume Target

Komponen instalasi listrik dari 20 paket (RENSTRA) menjadi 1 paket (RKPD); Pemeliharaan peralatan dan mesin dari 29 unit menjadi 32 unit; Sarana prasarana pendukung gedung meningkat signifikan. Terdapat perubahan Struktur Penganggaran, beberapa sub kegiatan dalam RENSTRA tetap ada namun dengan komposisi anggaran berbeda. Terjadi realokasi dari belanja rutin kecil ke belanja pemeliharaan dan rehabilitasi aset yang lebih besar.

Faktor penyebab ketidaksesuaian/perbedaan tersebut dapat dijelaskan oleh beberapa faktor antara lain penyesuaian terhadap kebutuhan riil operasional perangkat daerah tahun 2027; kebijakan penguatan pengelolaan dan pemeliharaan aset daerah; penyesuaian standar biaya dan kebutuhan riil belanja barang dan jasa; perubahan prioritas internal perangkat daerah; dinamika kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Secara umum, ketidaksesuaian antara RENSTRA dan RKPD Tahun 2027 pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bersifat teknis dan operasional, tidak mengubah arah kebijakan strategis, tidak mengubah tujuan dan indikator utama program, dan merupakan bentuk penyesuaian kebutuhan aktual dan prioritas tahun berjalan. Perubahan tersebut mencerminkan fleksibilitas perencanaan tahunan dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya perangkat daerah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2027

Rencana Kerja dan Pendanaan DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2027 dirumuskan untuk memastikan keterpaduan antara capaian kinerja tahun berjalan, evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, serta target-target strategis yang ditetapkan dalam Renstra. Penyusunan rencana ini juga mempertimbangkan perkembangan isu-isu krusial, dinamika kebutuhan pelayanan masyarakat, serta aspirasi pemangku kepentingan yang disampaikan melalui mekanisme Musrenbang dan forum perangkat daerah. Adapun Rencana Kerja DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2027 sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan adalah sebagai berikut:

Rencana Kerja DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2027

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						8.290.41 8.405,00							8.980.45 2.379,00	
	2					URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.290.41 8.405,00							8.980.45 2.379,00	
	2.08					URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PEMBERDAY AAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNG AN ANAK						7.773.58 8.405,00							8.091.72 7.379,00	
1 .	2.08.01					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH						6.715.41 8.405,00							6.890.88 2.179,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						KABUPATEN/ KOTA														
							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-		-	85,85 %	240.869.2 26,00						-	258.000.0 00,00	
							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-		-	Nilai 85,85	5.741.882 .179,00						-	5.741.882 .179,00	
							Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	-		-	85,85 Nilai	730.167.0 00,00						-	806.000.0 00,00	
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		-	77,1 %	240.869.2 26,00						-	258.000.0 00,00	
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		-	Nilai 77,1	5.741.882 .179,00						-	5.741.882 .179,00	
							Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		-	77,1 Nilai	722.667.0 00,00						-	801.000.0 00,00	
							Persentase terlaksananya a kegiatan pendukung urusan	-		-	100 %	6.705.418 .405,00						-	6.800.882 .179,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							pemerintah n													
	2.08.01.2 .01					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.00 0,00					DP3A PPKB Kota Salati ga		20.000.00 0,00	
						Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulka n dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-		2.500.000 ,00						-	5.000.000 ,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	-		2.500.000 ,00						-	5.000.000 ,00	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	-		-	-		5.000.000 ,00						-	10.000.00 0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
	2.08.01.2 .01.0006					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.000.000 ,00						10.000.00 0,00		
						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	-		-	10 Lapora n	5.000.000 ,00	Provin si Jawa Tenga h Kota Salati ga Keca matan Sidom ukti Kelur	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	4.Mem perkuat pemba ngunan sumber daya manusi a (SDM), sains, teknolo gi, pendidi kan,	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an	-	10.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Terselenggara nya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggar aan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	0 Doku men	2.500.000 ,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	4.Mem perkuat pemb ngunan sumber daya manusi a (SDM), sains, teknolo gi, pendidi kan, kesehat an, prestas i olahrag a, kesetar aan gender, serta pengua tan peran peremp uan, pemud a (genera si milenia l dan	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;		-	5.000.000 ,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
														generasi Z), dan penyandang disabilitas.						
	2.08.01.2.01.0009					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						2.500.000,00							5.000.000,00	
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	0 Data	2.500.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.08.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.741.882.179,00					-		5.741.882.179,00	
							Jumlah Dokumen Hasil	-		-	-	527.236.579,00						-	527.236.579,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F		
															NASIO NAL	DAERA H					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	5.214.645 .600,00						-	5.214.645 .600,00		
	2.08.01.2 .02.0001						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.214.645 .600,00							5.214.645 .600,00		
							Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	35 Orang /bulan	5.214.645 .600,00	Provin si Jawa Tenga h Kota Salati ga Keca matan Sidom ukti Kelur ahan Mang unsar i 0	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;		-	5.214.645 .600,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.08.01.2 .02.0002						Penyediaan Administrasi					527.236.5 79,00							527.236.5 79,00		

[illegible]

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Doku men	60.000.00 0,00	Provin si Jawa Tenga h Kota Salati ga Keca matan Sidom ukti Kelur ahan Mang unsar i 0	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	o. Mening katkan kualitas kelemb agaan dan pengem bangan kebijak an yang respons if terhada p kebutu han masyar akat;		-	60.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.08.01.2 .06					Administrasi Umum Perangkat Daerah						157.644.6 00,00					-		195.000.0 00,00	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	6.270.000 ,00						-	10.000.00 0,00	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	-		-	-	103.000.0 00,00						-	125.000.0 00,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Konsultasi SKPD													
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	35.669.60 0,00						-	40.000.00 0,00	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	8.170.000 ,00						-	10.000.00 0,00	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	4.535.000 ,00						-	10.000.00 0,00	
	2.08.01.2 .06.0001					Penyediaan Komponen InstalasiListrik /Penerangan Bangunan Kantor						4.535.000 ,00							10.000.00 0,00	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan	-		-	1 Paket	4.535.000 ,00	Provin si Jawa Tenga h Kota Salati	Dan a Alok asi Umu m	-	o. Mening katkan kualitas kelemb agaan dan		-	10.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F		
															NASIO NAL	DAERA H					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Kantor yang Disediakan						ga Kecamatan Sidomukti Kelurahan Mangunsari 0	(DAU)		pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat;				Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.08.01.2.06.0004						Penyediaan Bahan Logistik Kantor					35.669.600,00							40.000.000,00		
							Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	35.669.600,00	Provinsi Jawa Tengah Kota Salatiga Kecamatan Sidomukti Kelurahan Mangunsari 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	o. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat;		-	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.2 .06.0005					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.170.000 ,00							10.000.00 0,00	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	8.170.000 ,00	Provin si Jawa Tenga h Kota Salati ga Keca matan Sidom ukti Kelur ahan Mang unsar i 0	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	o. Mening katkan kualitas kelemb agaan dan pengem bangan kebijak an yang respons if terhada p kebutu han masyar akat;		-	10.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.08.01.2 .06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.270.000 ,00							10.000.00 0,00	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Lapora n	6.270.000 ,00	Provin si Jawa Tenga h Kota Salati ga Keca	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	o. Mening katkan kualitas kelemb agaan dan pengem bangan		-	10.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN KGAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
												matan Sidom ukti Kelur ahan Mang unsar i 0			kebijak an yang respons if terhada p kebutu han masyar akat;				dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana	
	2.08.01.2 .06.0009					Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						103.000.0 00,00						125.000.0 00,00		
						Terlaksananya Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Lapora n	103.000.0 00,00	Provin si Jawa Tenga h Kota Salati ga Keca matan Sidom ukti Kelur ahan Mang unsar i 0	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	o. Mening katkan kualitas kelemb agaan dan pengem bangan kebijak an yang respons if terhada p kebutu han masyar akat;		-	125.000.0 00,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.2 .07					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60.790.00 0,00					-		100.000.0 00,00	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	18.000.00 0,00						-	50.000.00 0,00	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	42.790.00 0,00						-	50.000.00 0,00	
	2.08.01.2 .07.0006					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.000.00 0,00							50.000.00 0,00	
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	18.000.00 0,00	Provin si Jawa Tenga h Kota Salati ga Keca matan Sidom	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	o. Mening katkan kualitas kelemb agaan dan pengem bangan kebijak an yang		-	50.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
												ukti Kelur ahan Mang unsar i 0			respons if terhada p kebutu han masyar akat;				uk dan Keluarg a Berenc ana	
	2.08.01.2 .07.0011					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						42.790.00 0,00						50.000.00 0,00		
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	42.790.00 0,00	Provin si Jawa Tenga h Kota Salati ga Keca matan Sidom ukti Kelur ahan Mang unsar i 0	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	o. Mening katkan kualitas kelemb agaan dan pengem bangan kebijak an yang respons if terhada p kebutu han masyar akat;		-	50.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Lapora n	868.000,0 0	Provin si Jawa Tenga h Kota Salati ga Keca matan Sidom ukti Kelur ahan Mang unsar i 0	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	o. Mening katkan kualitas kelemb agaan dan pengem bangan kebijak an yang respons if terhada p kebutu han masyar akat;		-	5.000.000 ,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.08.01.2 .08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						132.001.2 26,00							145.000.0 00,00	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Lapora n	132.001.2 26,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	o. Mening katkan kualitas kelemb agaan dan pengem bangan kebijak an yang		-	145.000.0 00,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															respons if terhada p kebutu han masyar akat;				uk dan Keluarg a Berenc ana	
	2.08.01.2 .08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						108.000.0 00,00							108.000.0 00,00	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Lapora n	108.000.0 00,00	Provin si Jawa Tenga h Kota Salati ga Keca matan Sidom ukti Kelur ahan Mang unsar i 0	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	o. Mening katkan kualitas kelemb agaan dan pengem bangan kebijak an yang respons if terhada p kebutu han masyar akat;		-	108.000.0 00,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.08.01.2 .09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang						444.232.4 00,00					-		516.000.0 00,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Urusan Pemerintahan Daerah														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	-		-	-	213.500.0 00,00						-	220.000.0 00,00	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	63.910.00 0,00						-	70.000.00 0,00	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	120.822.4 00,00						-	150.000.0 00,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	46.000.000,00						-	46.000.000,00	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	-		-	-	0,00						-	30.000.000,00	
	2.08.01.2.09.0001					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						120.822.400,00							150.000.000,00	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	-		-	42 Unit	120.822.400,00	Provin si Jawa Tengah Kota Salati ga Keca	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	o. Mening katkan kualitas kelemb aagan dan pengem bangan		-	150.000.000,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya						matan Sidom ukti Kelur ahan Mang unsar i 0		kebijak an yang respons if terhada p kebutu han masyar akat;				dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana	
	2.08.01.2 .09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						63.910.00 0,00						70.000.00 0,00		
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	6 Unit	63.910.00 0,00	Provin si Jawa Tenga h Kota Salati ga Keca matan Sidom ukti Kelur	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	o. Mening katkan kualitas kelemb agaan dan pengem bangan kebijak an yang respons if terhada		-	70.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
												ahan Mang unsar i 0			p kebutu han masyar akat;				Berenc ana	
	2.08.01.2 .09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						46.000.00 0,00							46.000.00 0,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	32 Unit	46.000.00 0,00	Provin si Jawa Tenga h Kota Salati ga Keca matan Sidom ukti Kelur ahan Mang unsar i 0	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	o. Mening katkan kualitas kelemb agaan dan pengem bangan kebijak an yang respons if terhada p kebutu han masyar akat;		-	46.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.08.01.2 .09.0009					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						213.500.0 00,00							220.000.0 00,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi	-		-	3 Unit	213.500.000,00	Provin si Jawa Tenga h Kota Salati ga Keca matan Sidom ukti Kelur ahan Mang unsar i 0	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	o. Mening katkan kualitas kelemb aga an dan pengem banan kebijak an yang respons if terhada p kebutu han masyar akat;		-	220.000.000,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengan dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.08.01.2 .09.0011					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							30.000.000,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	-		-	0 Unit	0,00	Provin si Jawa Tenga h Kota Salati	Dan a Alok asi Umu m	-	o. Mening katkan kualitas kelemb aga an dan		-	30.000.000,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB		
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A		PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F
																NASIO NAL	DAERA H			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Kantor atau Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi						ga Keca matan Sidom ukti Kelur ahan Mang unsar i 0	(DA U)		pengem bangan kebijak an yang respons if terhad a p kebutu han masyar akat;			Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana	
2 .	2.08.02					PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAY AAN PEREMPUAN						105.000. 000,00						145.000. 000,00		
							Persentase Kelembagaan PUG aktif	-		-	100 %	105.000.0 00,00						-	145.000.0 00,00	
	2.08.02.2 .01					Pelembagaan Pengarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Ko ta						36.976.00 0,00					Pemer intah Kota Salati ga		45.000.00 0,00	
							Jumlah laporan hasil koordinasi dan	-		-	-	5.000.000 ,00						-	10.000.00 0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F		
															NASIO NAL	DAERA H					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							sinkronisasi penyelenggaran PUG														
							Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaran PUG kewenangan Kab/Kota	-		-	-	31.976.000,00						-	35.000.000,00		
	2.08.02.201.0007						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota					5.000.000,00							10.000.000,00		
							Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaran PUG	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembanguan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	1. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup		-	10.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
														prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	masyarakat;					
	2.08.02.2 .01.0018					Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						31.976.00 0,00							35.000.00 0,00	

N O	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
										TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
														NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Lapora n	31.976.00 0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	4.Mem perkuat pemba ngunan sumber daya manusi a (SDM), sains, teknolo gi, pendidi kan, kesehat an, prestas i olahrag a, kesetar aan gender, serta pengua tan peran peremp uan, pemud a (genera si milenia l dan	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;		-	35.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Penge nalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
													generasi Z), dan penyandang disabilitas.							
	2.08.02.2.03					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						68.024.000,00					-		100.000.000,00	
						Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-			-	-	68.024.000,00						-	100.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.02.2 .03.0013					Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembanga n lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						68.024.00 0,00							100.000.0 00,00	
						Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembanga n lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaa n perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatka n advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	2 Lemba ga	68.024.00 0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	4.Mem perkuat pemba ngunan sumber daya manusi a (SDM), sains, teknolo gi, pendidi kan, kesehat an, prestas i olahrag a, kesetar aan gender,	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;		-	100.000.0 00,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
														serta pengua tan peran peremp uan, pemud a (genera si milenia l dan generas i Z), dan penyan dang disabili tas.						
3 .	2.08.03					PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN						70.000.0 00,00							130.000. 000,00	
							Persentase UPTD PPA sesuai standart layanan	-		-	100 %	70.000.00 0,00						-	80.000.00 0,00	
	2.08.03.2 .01					Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah						22.065.20 0,00					Masya rakat Kota Salati ga		50.000.00 0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Kewenangan Kab/Kota														
						Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	2 Kegiat an	22.065.20 0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	-		-	50.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.08.03.2 .02					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan						28.485.00 0,00					-		50.000.00 0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Kabupaten/Kota														
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkaua n korban Tingkat Kab/Kota	-		-	-	28.485.000,00						-	50.000.000,00	
	2.08.03.2.02.0014					Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						28.485.000,00							50.000.000,00	
						Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatka n Layanan	-		-	25 Orang	28.485.000,00	Kota Salatiga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur		-	50.000.000,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak,

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Pengaduan atau Penjangkaua n korban Tingkat Kab/Kota								angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;				Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana	
	2.08.03.2 .03					Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta						19.449.80 0,00				-		30.000.00 0,00		
							Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatka n bimbingan teknis dan pendamping an	-		-	-	19.449.80 0,00						-	30.000.00 0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.03.2 .03.0011					Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						19.449.80 0,00							30.000.00 0,00	
						Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatka n bimbingan teknis dan pendamping an	-		-	50 Orang	19.449.80 0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;		-	30.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
4 .	2.08.04					PROGRAM PENINGKATA N KUALITAS KELUARGA						650.000. 000,00							650.000. 000,00	
							Persentase PKK Aktif	-		-	100 %	650.000.0 00,00						-	650.000.0 00,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.04.2 .02					Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Ko ta						650.000.0 00,00					-		650.000.0 00,00	
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatka n peningkatan kapasitas		-		-	-	650.000.0 00,00						-	650.000.0 00,00	
	2.08.04.2 .02.0007					peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan						650.000.0 00,00							650.000.0 00,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta														
						Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatka n peningkatan kapasitas	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatka n peningkatan kapasitas	-		-	1 Lemba ga	650.000.0 00,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;		-	650.000.0 00,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
5 .	2.08.05					PROGRAM PENGELOLAA N SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						25.000.0 00,00							50.000.0 00,00	
							Persentase Perangkat Daerah yg berkontribus i dalam	-		-	100 %	25.000.00 0,00						-	50.000.00 0,00	

[illegible]

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	1 Doku men	25.000.00 0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	l. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;		-	50.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
6 .	2.08.06					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						102.223. 400,00							110.000. 000,00	
							Persentase kelembagaan forum anak yang aktif	-		-	100 %	102.223.4 00,00						-	110.000.0 00,00	
	2.08.06.2 .01					Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan						18.409.30 0,00					-		10.000.00 0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Kabupaten/Ko ta														
							Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatka n advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	18.409.30 0,00						-	10.000.00 0,00	
	2.08.06.2 .01.0007					Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						18.409.30 0,00							10.000.00 0,00	
						Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatka n advokasi	-		-	1 Lemba ga	18.409.30 0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	l. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur		-	10.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak,

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Kewenangan Kab/Kota	dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota								angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;				Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana	
	2.08.06.2 .02					Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta						83.814.10 0,00				-		100.000.0 00,00		
							Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatka n advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	83.814.10 0,00						-	100.000.0 00,00	

[illegible]

[illegible]

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota														
						Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatka n Layanan Pengaduan atau Penjangkaua n korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	20 Orang	20.101.40 0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	-		-	30.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.08.07.2 .03					Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat						85.845.20 0,00					-		85.845.20 0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Daerah Kabupaten/Ko ta														
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatka n advokasi dan sosialisasi	-		-	-	85.845.20 0,00						-	85.845.20 0,00		
	2.08.07.2 .03.0015					Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembanga n lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus					85.845.20 0,00							85.845.20 0,00		

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Kewenangan Kab/Kota														
						Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembang an lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatka n advokasi dan sosialisasi	-		-	1 Lemba ga	85.845.20 0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;		-	85.845.20 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.14					URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PENGENDALI AN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						516.830. 000,00							888.725. 000,00	
8 .	2.14.02					PROGRAM PENGENDALI AN PENDUDUK						183.125. 000,00							228.725. 000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelura han	-		-	100 %	175.125.0 00,00						-	198.725.0 00,00	
							Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	-		-	0,07 %	175.125.0 00,00						-	198.725.0 00,00	
							Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	-		-	23 Tahun	175.125.0 00,00						-	198.725.0 00,00	
	2.14.02.2 .01						Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk					120.000.0 00,00					-		162.000.0 00,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah dokumen hasil advokasi dan sosialisasi tentang hasil analisis dampak kependudukan sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	-		-	-	55.000.000,00						-	60.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	-		-	-	8.000.000,00						-	25.000.000,00	
							Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan	-		-	-	8.000.000,00						-	20.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							isu terpadu kependuduk an													
							Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependuduk an pada Sekolah Siaga Kependuduk an (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependuduk an (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependuduk an (ASN PK) di lembaga kediklatan/O PD kabupaten/	-		-	-	22.000.00 0,00						-	30.000.00 0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.													
							Tersedianya laporan penyelenggaraan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	-		-	-	27.000.000,00						-	27.000.000,00	
	2.14.02.201.0040					Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas						8.000.000,00							20.000.000,00	
						Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	-		-	23 Kampung KB	8.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup.		-	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;				uk dan Keluarg a Berenc ana	
	2.14.02.2 .01.0041					Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggara an Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)						27.000.00 0,00						27.000.00 0,00		
						Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggara an Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	Tersedianya laporan penyelenggar aan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)	-		-	0 Anaka n	27.000.00 0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;		-	27.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana

[illegible]

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						n (PJPK) Tingkat Kabupaten/Ko ta														
						Terlaksananya Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependuduka n dan Pemanfaatan (PJPK) dan Rencana Aksi Tingkat Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembanguna n Kependuduk an (PJPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	-		-	1 Doku men	8.000.000 ,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	-		-	25.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.14.02.2 .01.0055					Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependuduka n pada Sekolah Siaga Kependuduka n (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka						22.000.00 0,00							30.000.00 0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Peduli Kependuduka n (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependuduka n (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependuduka n (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.														
						Terlaksananya advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependuduka n pada Sekolah Siaga Kependuduka n (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependuduk an pada Sekolah Siaga Kependuduk an (SSK) di	-		-	0 Lapora n / Doku men	22.000.00 0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	-		-	30.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						dan SMP/ Pramuka Peduli Kependuduka n (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependuduka n (ASN PK) di lembaga kediklatan/OP D kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependuduka n (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	satuan pendidikan jenjang SD/ sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependuduk an (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependuduk an (ASN PK) di lembaga kediklatan/O PD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependuduk an (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.												Berenc ana	
	2.14.02.2 .02					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah						63.125.00 0,00					-		66.725.00 0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Kabupaten/Kota														
							Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	-		-	-	0,00						-	0,00	
							Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-		-	-	26.400.000,00						-	30.000.000,00	
							Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakann Pencatatan dan Pengumpulann Data Keluarga	-		-	-	36.725.000,00						-	36.725.000,00	
	2.14.02.2.02.0011					Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						0,00							0,00	

[illegible]

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	-		-	0 Doku men	26.400.00 0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;		-	30.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Penge ndalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.14.02.2 .02.0030					Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						36.725.00 0,00							36.725.00 0,00	
						Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanaka n Pencatatan dan Pengumpula n Data Keluarga	-		-	23 Lapora n	36.725.00 0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik		-	36.725.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Penge ndalian Pendud uk dan Keluarg

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															an kualitas hidup masyar akat;				a Berenc ana	
9 .	2.14.03					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						298.705. 000,00							610.000. 000,00	
						Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	-		-	68,77 %	228.705.0 00,00						-	490.000.0 00,00		
						Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi)	-		-	83,5 %	228.705.0 00,00						-	490.000.0 00,00		
						Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	-		-	11,2 %	228.705.0 00,00						-	490.000.0 00,00		
						Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		-	27,05 %	228.705.0 00,00						-	490.000.0 00,00		

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Rasio akseptor KB baru	-		-	14,5 %	228.705.0 00,00						-	490.000.0 00,00	
							-	-		-	-	70.000.00 0,00						-	70.000.00 0,00	
	2.14.03.2 .01					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						83.600.00 0,00					-		120.000.0 00,00	
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		-		-	-	28.600.00 0,00						-	50.000.00 0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga, Kependuduk an, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	-		-	-	35.000.00 0,00						-	50.000.00 0,00	
							Jumlah Organisasi yang Mendapatka n Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangun an Keluarga,	-		-	-	20.000.00 0,00						-	20.000.00 0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N O	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
										TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS		TAR GET	PAGU INDIKATI F		
														NASIO NAL					DAERA H
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	-		-	1 Organisasi	20.000.000,00	Kota Salatiga	Dan a Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat;		-	20.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						70.000.000,00					-		70.000.000,00	
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-		-	-	70.000.000,00						-	70.000.000,00	
	2.14.03.2.02.0004				Penggerakan Kader Institusi						70.000.000,00							70.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB	
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F		
															NASIO NAL	DAERA H					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Masyarakat Pedesaan (IMP)															
						Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	-		-	255 Orang	70.000.00 0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;		-	70.000.00 0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana	
	2.14.03.2 .03					Pengendalian dan Pendistribusia n Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Ko ta						145.105.0 00,00					-		420.000.0 00,00		
							Jumlah Akseptor	-		-	-	120.000.0 00,00							-	120.000.0 00,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria													
							Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	-		-	-	0,00						-	0,00	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		-	-	25.105.00 0,00						-	300.000.0 00,00	
							Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana	-		-	-	0,00						-	0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							dan Kesehatan Reproduksi													
	2.14.03.2 .03.0003					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						25.105.00 0,00							300.000.0 00,00	
						Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	-		-	0 Orang	25.105.00 0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;		-	300.000.0 00,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengen dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.14.03.2 .03.0004					Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan						0,00							0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Kegagalan Penggunaan MKJP														
						Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	-		-	0 Lapora n	0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;		-	0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Pengn dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.14.03.2 .03.0010					Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						0,00							0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	-		-	0 Orang	0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;		-	0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Penge n dalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.14.03.2 .03.0013					Peningkatan Kesertaan KB Pria						120.000.0 00,00							120.000.0 00,00	
						Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	-		-	0 Orang	120.000.0 00,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an		-	120.000.0 00,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Penge n dalian Pendud uk dan Keluarg a

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
															kualitas hidup masyar akat;				Berenc ana	
1 0 .	2.14.04					PROGRAM PEMBERDAY AAN DAN PENINGKATA N KELUARGA SEJAHTERA (KS)					35.000.0 00,00							50.000.0 00,00		
							Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	-		-	96,93 %	35.000.00 0,00						-	50.000.00 0,00	
							Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	-		-	93,96 %	0,00						-	0,00	
							Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	-		-	100 %	35.000.00 0,00						-	50.000.00 0,00	
							Cakupan Kader BKB yang Terlatih	-		-	75,97 %	35.000.00 0,00						-	50.000.00 0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Indeks Lansia Berdaya	-		-	57,1 Indeks	0,00						-	0,00	
							Indeks Lansia Berdaya	-		-	57,1 %	35.000.000,00						-	50.000.000,00	
							Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	-		-	93,6 Indeks	0,00						-	0,00	
							Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	-		-	93,6 %	35.000.000,00						-	50.000.000,00	
							Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	-		-	57,7 %	35.000.000,00						-	50.000.000,00	
							Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	-		-	1:2 Rasio	0,00						-	0,00	
							Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana	-		-	1:2 rasio	35.000.000,00						-	50.000.000,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Desa (PPKBD)													
	2.14.04.2 .01					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						35.000.00 0,00					-		50.000.00 0,00	
						Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pel atihan Teknis Pelaksana/K ader Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/Us aha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-		-	-	0,00						-		0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UP PKA)	-		-	-	0,00						-	0,00	
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi	-		-	-	35.000.00 0,00						-	50.000.00 0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Keluarga/UP PKS)													
	2.14.04.2 .01.0017					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						35.000.00 0,00						50.000.00 0,00		

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	-		-	0 Laporan	35.000.000,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat;		-	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0019					Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						0,00							0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	-		-	0 Orang	0,00	Kota Salatiga	Dan a Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0021					Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan						0,00							0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
						Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraa n Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaa n Ekonomi Keluarga/UPPKA)	-		-	0 Lapora n	0,00	Kota Salati ga	Dan a Alok asi Umu m (DA U)	-	1. Mening katkan pemenu han hak dasar, pengur angan beban hidup, dan perbaik an kualitas hidup masyar akat;		-	0,00	Dinas Pember dayaan Peremp uan, Perlind ungan Anak, Penge nalian Pendud uk dan Keluarg a Berenc ana
	2.14.04.2 .02					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam						0,00					-		0,00	

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
											TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
															NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.14.04.2.02.0008					Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga						0,00							0,00	
						Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-		-	0 Laporan	0,00	Kota Salatiga	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

N O	KODE						URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR	TAR GET AKH IR REN STR A	REAL ISASI 2025	PRAKI RAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPOK SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
												TARG ET 2027	PAGU INDIKATI F	LOKA SI	SUM BER DAN A	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F	
																NASIO NAL	DAERA H				
(1)	(2)						(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																	kualitas hidup masyar akat;				Berenc ana
	J U M L A H												8.290.41 8.405,00							8.980.45 2.379,00	

4.2. Program Prioritas Daerah dan Kontribusi terhadap Target Nasional

Dalam rangka menyelaraskan pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp8.290.418.405 DP3APPKB Kota Salatiga memformulasikan kerangka kerja belanja langsung untuk mendukung target makro pembangunan nasional dan daerah yang tertuang pada RKPD (Peningkatan SDM Berdaya Saing dan Berkarakter). Program prioritas ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan

Pagu Anggaran Indikatif: Rp105.000.000,00 (Prakiraan 2028: Rp145.000.000,00)

Kontribusi Target Nasional/Daerah: Melalui subkegiatan *Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG (2.08.02.2.01.0007)*, program ini diarahkan untuk mempertahankan persentase 100% Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) guna mendongkrak capaian nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Salatiga.

Kelompok Sasaran: Seluruh Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga serta organisasi perempuan.

2. Pengendalian Kuantitas Penduduk Melalui Kampung KB Berdaya

Pagu Anggaran Indikatif: Rp183.125.000,00 (Prakiraan 2028: Rp228.725.000,00)

Kontribusi Target Nasional/Daerah: Terfokus pada subkegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas (2.14.02.2.01.0040) pada 23 Kampung KB. Program ini bertujuan mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, mempertahankan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) pada usia ideal 23 tahun, serta menurunkan persentase Pasangan Usia Subur (PUS) dengan istri di bawah usia 20 tahun menjadi 0,07%.

4.3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial

DP3APPKB Kota Salatiga mengemban mandat wajib pelayanan non-dasar yang beririsan langsung dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, khususnya dalam hal penyediaan layanan perlindungan terpadu bagi korban tindak kekerasan. Kerangka pendanaannya diurai sebagai berikut:

1. Pelayanan Rujukan Lanjutan Perempuan Korban Kekerasan

Pagu Anggaran Indikatif: Rp70.000.000,00 (Prakiraan 2028: Rp130.000.000,00)

Target Output SPM: Menjamin tercapainya 100% penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Pagu dialokasikan pada subkegiatan *Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO (2.08.03.2.02.0014)* dengan target intervensi langsung minimal kepada 25 orang korban per tahun.

2. Pelayanan Komprehensif Anak Korban Kekerasan

Pagu Anggaran Indikatif: Rp105.946.600,00 (Prakiraan 2028: Rp115.845.200,00)

Target Output SPM: Menjamin 100% anak korban kekerasan mendapatkan layanan penanganan pengaduan, medis, psikologis, dan bantuan hukum yang komprehensif. Anggaran ini dititikberatkan pada subkegiatan *Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan (2.08.07.2.02.0017)* dengan target minimal penanganan 20 orang anak.

4.4. Program Strategis Nasional (ProSN): Percepatan Penurunan Stunting

Sebagai wujud kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, DP3APKB mengintegrasikan intervensi hulu kependudukan dan pembangunan keluarga secara masif pada aspek ketahanan keluarga:

1. Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Sejahtera

Pagu Anggaran Indikatif: Rp79.000.000,00 (Prakiraan 2028: Rp130.000.000,00)

Strategi Intervensi Stunting: Pendanaan dialokasikan untuk mengaktivasi kelompok kegiatan (Poktan) melalui subkegiatan Promosi/Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (2.14.04.2.01.0017)

Target Kunci: Memastikan 100% balita/anak terpantau tumbuh kembangnya sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA) serta menjaga rasio Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) pada posisi ideal (46:23 kelurahan).

4.5. Isu Tematik Bidang Urusan dan Direktif Pemerintah

Untuk merespon isu-isu kedemografian dan amanat direktif dari Pemerintah Pusat (BKKBN dan Kementerian PPPA), kerangka pendanaan diarahkan pada dua sektor berikut:

1. Peningkatan Kesertaan KB dan Penggunaan MKJP (Amanat BKKBN)

Pagu Anggaran Indikatif: Rp298.705.000,00 (Prakiraan 2028: Rp610.000.000,00)

Fokus Tematik: Dialokasikan melalui *Program Pembinaan Keluarga Berencana (2.14.03)* untuk menekan angka Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) menuju target 11,2% serta mendongkrak persentase kontrasepsi modern/mCPR. Anggaran dioptimalkan pada subkegiatan *Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang / MKJP (2.14.03.2.03.0003)* dengan target sasaran meningkatkan proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi (*Demand Satisfied*) menjadi 83,5%.

2. Keberlanjutan Predikat Kota Layak Anak (Amanat KemenPPPA)

Pagu Anggaran Indikatif: Rp102.223.400,00 (Prakiraan 2028: Rp110.000.000,00)

Fokus Tematik: Mengalokasikan dana pada Program Pemenuhan Hak Anak (2.08.06) melalui subkegiatan Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan PHA (2.08.06.2.01.0007) demi mewujudkan 100% kelembagaan Forum Anak yang aktif dan terfasilitasi dari tingkat kelurahan hingga kota, sebagai instrumen utama pemenuhan hak sipil anak di Kota Salatiga.

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga diukur melalui kompilasi indikator kinerja yang terstruktur. Berdasarkan Keputusan Kepala DP3APPKB Nomor: 700.1.1.4/52050/0122/401, penetapan target target indikator ini dirancang untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah yang responsif gender, ramah anak, dan berwawasan kependudukan. Secara ringkas, berikut adalah rekapitulasi target indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci DP3APPKB Kota Salatiga untuk Tahun 2027:

Tabel 5.1

Matriks Target Indikator Kinerja DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target
A	Indikator Kinerja Utama (IKU)		
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	70,4
2	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	%	39,1
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	72,6
4	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	71,12
5	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	80,37
6	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Per 100.000 KH	0,55
7	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	84,5
B	Indikator Kinerja Kunci (IKK)		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,31
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	%	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	68,59
4	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak / wanita	1,74

5.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan strategis instansi dalam mencapai tujuan jangka menengah daerah. Arah penetapan target tahun 2027 didasarkan pada analisis capaian riil dokumen LKjIP Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Target 2027: 70,4 (Kategori: baik(tangguh))

Definisi & Evaluasi Riil 2025: Pengukuran komposit yang mencakup Dimensi Ketentraman, Kemandirian, dan Kebahagiaan keluarga. Capaian fondasi indikator ini didorong oleh keberhasilan luar biasa Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera pada tahun 2025, di mana persentase baduta stunting terealisasi sebesar 6,02%, jauh melampaui target awal sebesar 22%. Keberhasilan intervensi stunting ini, ditambah dengan capaian Balita ber-KKA yang menyentuh 99,66%, memantapkan ketahanan keluarga di Kota Salatiga. Oleh karena itu, target 2027 diarahkan pada penguatan kemandirian ekonomi akseptor melalui optimalisasi kelompok kegiatan Tribina dan UPPKA.

2. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan

Target 2027: 39,1%.

Definisi & Evaluasi Riil 2025: Menghitung persentase tingkat keparahan dan sebaran kekerasan. Dokumen LKjIP 2025 mencatat penurunan drastis pada rasio kekerasan terhadap perempuan dari 44,1% pada tahun 2024 menjadi 6,31% pada tahun 2025. Penurunan tajam ini menunjukkan keberhasilan program pencegahan terpadu. Namun demikian, belajar dari karakteristik pelaporan, penurunan ini berpotensi dipengaruhi oleh dinamika keengganan korban melapor (fenomena gunung es). Guna mengantisipasi peningkatan pelaporan pasca-masifnya pembukaan kanal aduan daring dan hotline UPTD PPA di kelurahan, target tahun 2027 dipatok secara realistis-aman pada angka 39,1%.

3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Target 2027: 72,6.

Definisi & Evaluasi Riil 2025: Ukuran komposit pemenuhan 5 klaster Konvensi Hak Anak (KHA). Evaluasi tahun 2025 menunjukkan bahwa Kota Salatiga meraih capaian skor Kota Layak Anak (KLA) sebesar 682,21 (109,15% dari target). Meskipun secara administratif melampaui target, data tersebut merupakan carry-over penilaian tahun 2024 akibat absennya evaluasi nasional di tahun 2025. Maka dari itu, target tahun 2027 dinaikkan secara gradual untuk mendorong kesiapan Kota Salatiga naik kelas dari kategori KLA Nindya menuju Kategori Utama melalui perbaikan kualitas layanan riil ramah anak.

4. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

Target 2027: 71,12.

Definisi & Evaluasi Riil 2025: Menitikberatkan klaster hak sipil, pengasuhan alternatif, kesehatan dasar, serta pendidikan/kegiatan budaya. Indikator ini mendapat daya ungkit besar pada tahun 2025 dari lonjakan drastis persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak/Forum Anak yang mencapai 85,56% (dari target 64,06%). Keberhasilan ini disebabkan oleh perbaikan administrasi data dan fasilitasi kegiatan Forum Anak yang tertib hingga tingkat kelurahan. Target 2027 berfokus menjaga tren keterlibatan anak agar tetap berada di atas 70% secara substansial.

5. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Target 2027: 80,37 (Kategori: Sangat Baik).

Definisi & Evaluasi Riil 2025: Mengukur dimensi pencegahan, penanganan, dan pemulihan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Hasil evaluasi 2025 menunjukkan tantangan pada persentase anak korban kekerasan yang berada pada angka 0,11% (belum mencapai target penurunan optimal 0,02%). Peningkatan pelaporan ini di satu sisi menunjukkan keberhasilan KIE yang membuat masyarakat berani melapor. Strategi tahun 2027 difokuskan untuk memperkuat gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat RW untuk mempertajam deteksi dini.

6. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)

Target 2027: 0,55 per 100.000 kelahiran hidup.

Definisi & Evaluasi Riil 2025: Menunjukkan intensitas kelahiran di kalangan remaja perempuan. Pada evaluasi program Pengendalian Penduduk tahun 2025, indikator pendukung ASFR menunjukkan kinerja yang sangat terkendali, di mana angka fertilitas remaja berhasil ditekan hingga 1,24 dari target maksimal 1,75. Tren positif ini dipertahankan untuk tahun 2027 dengan memperluas integrasi KIE kesehatan reproduksi bersama Forum GenRe dan PIK-R guna menekan perkawinan usia dini.

7. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Target 2027: 84,5 (Kategori: Sangat Tinggi).

Definisi & Evaluasi Riil 2025: Mengukur integrasi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk ke dalam perencanaan pembangunan. Kinerja tahun 2025 mencatat suksesnya penyediaan informasi data mikro keluarga sebesar 100% di seluruh kelurahan. Dasar data yang kuat ini dimanfaatkan pada tahun 2027 untuk mewajibkan 100% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengadopsi dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar ke dalam Rencana Kerja sektoral masing-masing.

5.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2027

Indikator Kinerja Kunci (IKK) ditujukan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Target IKK tahun 2027 ditetapkan dengan mencerminkan efisiensi dan efektivitas belanja tahun 2025:

1. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD

Target 2027: 9,31%.

Definisi & Evaluasi Riil 2025: Proporsi anggaran yang menerapkan pendekatan Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap total belanja daerah. Realisasi komitmen anggaran responsif gender pada Belanja APBD tahun 2025 berhasil menyentuh 6%, melampaui target perencanaan sebesar 3,8%. Berkaca dari tingginya komitmen OPD

tersebut, target tahun 2027 diproyeksikan meningkat signifikan ke angka 9,31%. Intervensi digeser dari sekadar pemenuhan administratif ke peningkatan kualitas Gender Budget Statement (GBS) pada subkegiatan berdaya ungkit tinggi.

2. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait Kota
Target 2027: 100,00%.

Definisi & Evaluasi Riil 2025: Memastikan seluruh kasus anak korban kekerasan yang dilaporkan mendapatkan layanan penanganan komprehensif (medis, psikologis, hukum, dan sosial) secara tuntas. Pendekatan multidisiplin yang terintegrasi ini sangat krusial untuk memastikan proses pemulihan trauma berjalan optimal dan mengembalikan fungsi sosial anak di tengah masyarakat. Kinerja UPTD PPA Kota Salatiga terbukti sangat konsisten menjaga performa pelayanan, di mana pada tahun 2025 seluruh kasus anak yang dilaporkan berhasil ditangani 100%. Capaian paripurna tersebut merupakan wujud nyata dari kuatnya komitmen institusional serta sinergitas lintas sektor dalam mengawal standar operasional pendampingan korban. Keberhasilan tata laksana pelayanan ini wajib dipertahankan secara mutlak pada tahun 2027. Oleh karena itu, keberlanjutan dukungan sumber daya dan peningkatan kualitas layanan menjadi prasyarat utama agar pemerintah senantiasa hadir memberikan perlindungan tertinggi bagi setiap anak.

3. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)

Target 2027: 68,59%.

Definisi & Evaluasi Riil 2025: Menghitung sebaran kasus kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang terstandardisasi populasi perempuan. Tahun 2025 mencatat total ada 30 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani secara komprehensif. Keberhasilan penanganan terhadap puluhan kasus ini mengindikasikan semakin membaiknya aksesibilitas layanan serta meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan. Untuk tahun 2027, basis data disinkronkan lintas sektor melalui Simfoni PPA, Polres, dan Rumah Sakit guna menurunkan rasio kerentanan riil perempuan di ruang publik maupun domestik. Integrasi pencatatan

pelaporan lintas lembaga ini sangat esensial untuk memastikan validitas data, mencegah duplikasi informasi, dan mempercepat langkah intervensi di lapangan. Dengan berbekal pemetaan data yang akurat dan terpadu tersebut, perumusan kebijakan serta program pencegahan dapat dirancang secara lebih presisi guna mewujudkan lingkungan yang benar-benar aman dan inklusif bagi perempuan.

4. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS Usia 15-49 Tahun

Target 2027: 1,74 rata-rata anak per wanita.

Definisi & Evaluasi Riil 2025: Rata-rata anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan sepanjang masa reproduksinya. Evaluasi tahun 2025 menunjukkan realisasi TFR Kota Salatiga berada di angka 2,02. Angka ini sejatinya sangat baik karena berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk di bawah batas aman target jangka menengah (TFR target 2,2). Namun, terdapat kenaikan jika dibandingkan tahun 2024 (1,7). Guna menjaga tren pertumbuhan penduduk yang seimbang, target tahun 2027 dikunci pada angka 1,74 dengan memperluas akses pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) modern di seluruh fasilitas kesehatan binaan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah serta berpedoman pada RKPD Kota Salatiga Tahun 2027. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

a. Catatan Penting

Pelaksanaan Renja Tahun 2027 harus menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta berorientasi pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam hal ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan perencanaan, maka dilakukan penyesuaian melalui penajaman prioritas program dan kegiatan dengan tetap mengutamakan pelayanan dasar, pencapaian indikator kinerja utama, serta kegiatan yang bersifat strategis dan mendesak. Optimalisasi efisiensi belanja dilakukan tanpa mengurangi kualitas output dan outcome kegiatan, khususnya pada urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk serta keluarga berencana. Setiap perubahan kebijakan, regulasi, maupun dinamika kondisi sosial masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan program agar segera direspons melalui mekanisme penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renja DP3APPKB Tahun 2027 berpedoman pada kaidah sebagai berikut:

- Mengutamakan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.
- Mengedepankan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi lintas perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai dasar pengendalian dan perbaikan kinerja.
- Menjamin tertib administrasi, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan dan kinerja.

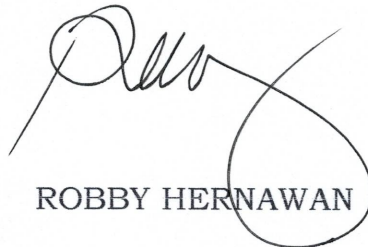
c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Renja Tahun 2027, akan dilakukan:

- Penjabaran program dan kegiatan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2027.
- Penyusunan rencana aksi dan jadwal pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang.
- Penandatanganan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pencapaian target.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.
- Penyusunan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja DP3APPKB Kota Salatiga Tahun 2027 ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN